

Konsep Kekuasaan menurut Byung-Chul Han dan Sumbangannya dalam Meminimalisir Anomali Kekuasaan di Indonesia

¹Yasintus Harjon, ²Robertus Wijanarko

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia. Email: cainharjon@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia. Email: rwijanarko68@gmail.com

Abstract: *The focus of this article is to discuss Byung-Chul Han's concept of power and his contributions to efforts aimed at minimizing various anomalies in power relations in Indonesia. Essentially, power is an integral part of nation-building and statehood. Power originates from and exists to serve the interests of all people in order to create welfare, equality, and the common good. The manifestation of power for unilateral interests is not something to be desired and should not be the primary goal to pursue. However, it cannot be denied that there are still practices of power that do not prioritize the common good in contemporary Indonesian society. Such abuses of power are evident in the relations between the government and the people, superiors and subordinates, and the majority and minorities, which tend to be authoritarian, violent, repressive, and dominant. This article employs a literature review methodology, critically examining the themes discussed along with various supporting literature. This writing finds that, according to Byung-Chul Han, power is fundamentally a reciprocal dependency relationship between the ego and the alter based on certain mediating capacities. Power with high mediating capacity will produce symmetrical, harmonious, and non-repressive power. In contrast, power with minimal or no mediation tends to be asymmetrical. For him, the various imbalances of power present in Indonesia's democratic society today indicate an asymmetrical power relationship between the ego and the alter.*

Keywords: *Power; Ego; Alter; Symmetrical Relationship; Common Good.*

Abstrak: Fokus artikel ini ialah berbicara tentang konsep kekuasaan Byung-Chul Han dan sumbangannya dalam usaha meminimalisir beragam anomali relasi kekuasaan di Indonesia. Pada dasarnya kekuasaan merupakan bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan berasal dari dan ada untuk melayani kepentingan semua orang agar terciptanya kesejahteraan, kesetaraan, dan common good. Pengejawantahan kekuasaan untuk kepentingan sepihak bukan menjadi sesuatu yang pantas dirindukan dan bukan menjadi tujuan utama yang harus dikejar. Namun, tidak dapat disangkal bahwa masih ada praktik kekuasaan yang tidak mengutamakan common good dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Penyelewengan kekuasaan itu nyata dalam relasi antara pemerintah vs rakyat, atasan vs bawahan, dan mayoritas vs minoritas, yang mana cenderung otoriter, kekerasan, represif, dan dominatif. Kajian penulisan artikel ini menggunakan metode pustaka dengan membaca dan menelaah secara kritis tema yang digarap dan berbagai literatur yang mendukung. Tulisan ini menemukan bahwa menurut Byung-Chul Han, kekuasaan sejatinya adalah relasi ketergantungan timbal balik antara ego dan alter atas dasar kapasitas mediasi tertentu. Kekuasaan yang memiliki kapasitas mediasi yang tinggi akan melahirkan kekuasaan simetris, harmonis, dan tanpa represi. Sementara, kekuasaan minim atau tanpa mediasi cenderung asimetris. Baginya, beragam ketimpangan kekuasaan yang ada dalam masyarakat demokrasi Indonesia saat ini menandakan adanya relasi kekuasaan asimetris antara ego dan alter.

Kata Kunci: Kekuasaan; Ego; Alter; Relasi Simetris; Common Good.

1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*) (Koten, 2010). Sebagai makhluk politik, ia mempunyai kemampuan untuk hidup bersama dengan yang lain dan mengembangkan potensi diri demi kelangsungan eksistensinya. Salah satu ekspresi nyata dari keberadaan manusia dalam kehidupan bersama dengan yang lain adalah adanya kehendak untuk membangun sebuah relasi kekuasaan. Tujuannya ialah agar terciptanya kehidupan yang harmonis, sejahtera, adil, dan makmur. Menurut Maine de Biran (1766-1824) seorang filsuf empiris Perancis, inilah kehendak terdalam hidup manusia. Manusia tidak hanya memiliki dimensi aku yang berpikir sebagaimana

tertuang dalam gagasan terkenal Descartes *'cogito ergo sum'*, tetapi juga 'aku yang berkehendak' (Truman, 1904). Dasar dari kehendak itu ialah *'human personality'* sebagai keseluruhan adanya, baik mencakup yang spiritual maupun yang jasmani (Sutrisno, 2004).

Nietzsche menyebut ini "the will to power." Dalam bukunya berjudul *'The Will to Power'* (Nietzsche, 1968), ia menegaskan hakikat terdalam manusia, yakni kehendak untuk berkuasa. Sementara itu, dalam *The Genealogy of Morals* sebagaimana dikutip oleh Sunardi (1996), Nietzsche melihat hidup sebagai kehendak untuk berkuasa. Hal ini diuraikannya lagi dalam buku *Beyond Good and Evil* yang mengatakan bahwa dunia merupakan kehendak untuk berkuasa (Sunardi, 1996). Dari penjelasan ini sepintas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa kekuasaan atau kehendak untuk berkuasa adalah dasar dari apa yang disebut ada. Manusia, dunia, dan semesta adalah kehendak untuk berkuasa. Kekuasaan sejatinya dipahami sebagai relasi ketergantungan timbal balik antara *ego* dan *alter* (Han, 2005) yang didasarkan atas prinsip kesetaraan, kesederajatan, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan yang dialami semua bukan sepihak. Kekuasaan menjadi semacam kekuatan yang merangkul dan menyambut setiap orang yang berkehendak baik demi terwujudnya *common good*. Sehingga tanda adanya stabilitas kekuasaan ialah apabila terjadinya keselarasan sosial yang sempurna, seperti keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran di tengah *societas* (Suseno, 2016). Setiap hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat seharusnya dibahas dan dibicarakan secara terbuka, agar menghasilkan *output* yang mampu menjamin terwujudnya kebaikan bersama (*probono publico*) (Iskandar, 2015).

Namun harus diakui bahwa dewasa ini praktik kekuasaan yang mengutamakan keselarasan dan kesejahteraan sosial tampak suram oleh karena kemakmuran sekelompok kecil manusia menjadi prioritas pertama. Di ruang publik Indonesia, kekuasaan sering kali dicerderai dan diperkosa oleh berbagai kepentingan. Subyek kekuasaan kerap menjadikan sesama sebagai obyek yang pantas dieksploitasi, dimusnahkan atau dieliminasi (Kardiat, 2022). Pada hal setiap pribadi sederajat, tidak ada yang merasa superior dan tuan atas yang lain. Semua orang setara sebagai makhluk bermartabat. Wajah buruk kekuasaan itu nyata dalam isu seperti pemerintah *vs* rakyat, mayoritas *vs* minoritas dan beragam jenis tindakan dominatif, otoriter, represif, intimidatif, kekerasan, dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sudah menjadi semacam kultur. Byung-Chul Han seorang filsuf kontemporer berkebangsaan Korea Selatan berhadapan dengan aneka persoalan tersebut melihat adanya relasi kekuasaan asimetris antara *ego* dan *alter*. Menurutnya, hubungan kekuasaan simetris adalah kekuasaan yang dibangun atas dasar tingkat mediasi yang tinggi. Di mana *ego* menghendaki kehendaknya dalam *alter* dan begitupun sebaliknya *alter* menerima keinginan *ego* sebagai keputusannya sendiri. Sehingga keputusan *ego* menjadi semakin nyata dalam *alter* dan keduanya sama-sama memperoleh perasaan senang dan bebas.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ramadhani, dkk dengan judul 'Kekuasaan dan Politik dalam Organisasi' menegaskan bahwa kekuasaan sering kali menjadi sumber konflik, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan (Suci Ramadhani et al., 2023). Politik, sebagai proses pengambilan keputusan, dapat memengaruhi distribusi kekuasaan. Kekuasaan tidak lebih dari sekedar strategi yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari (Salsabilah & Yuniike Putri, n.d.). Menurut Kamahi, apabila kekuasaan dilihat sebagai atribusi, kapasitas, ataupun modal yang dimiliki atau digenggam seseorang untuk mencapai tujuan tertentu akan menimbulkan aneka persoalan (Kamahi, 2017). Di satu sisi, cara-cara negatif dan kasat mata tidak akan membuat dominasi menjadi mapan dan bertahan. Di lain sisi, dengan memanipulasi keinginan-keinginan, ideologi, dan hasrat sulit dapat membangkitkan rasa mawas diri seseorang, sehingga penundukan dan eksploitasi terasa sebagai kenikmatan dan candu. Atas dasar itu Triantini dalam penelitiannya berjudul "Meta Konsep Kekuasaan dan Demokrasi dalam Kajian Teori Politik" mengatakan bahwa hadirnya kekuasaan dalam berbagai bentuk namun bukan sebagai representasi kehendak baik dan kepentingan masyarakat, maka keberadaannya akan

berbenturan dengan sekelompok orang masyarakat yang menyebut dirinya sebagai representasi masyarakat (Triantini, 2019).

Gagasan kekuasaan *ala* Byung-Chul Han belum pernah dibahas di Indonesia, termasuk beberapa karya besar lainnya. Filsuf kontemporer ini tampak asing di negeri ini, tetapi sejatinya di wilayah Eropa karya-karyanya banyak diterjemahkan ke dalam aneka bahasa terutama bahasa Inggris, dibahas, dan dikutip oleh banyak penulis. Caroline Alpin dan François Debrix (2021) dalam artikelnya “*Biopolitics in the ‘Psychic Realm’: Han, Foucault and Neoliberal Psychopolitics*” berusaha mengupas gagasan Byung-Chul Han mengenai psikopolitik dan idenya tentang subyek neoliberal. Alpin dan Debrix menemukan dalam gagasan Byung-Chul Han bahwa proses mental menjadi titik fokus utama bagi kekuasaan dewasa ini. Biopolitik yang digagas Foucauldian sudah usang di era neoliberal oleh karena fokus utama biopolitik pada tubuh daripada proses mental. Sehingga, *biopower* harus memberi jalan kepada apa yang disebut *psychopower* karena gagasan kritis untuk memahami neoliberal melalui lensa biopolitik tidak lagi memadai di era neoliberal kontemporer.

Ruang kosong yang terdapat dalam penelitian terdahulu mendorong penulis mengangkat konsep kekuasaan menurut Byung-Chul Han dan memetakan kontribusinya dalam menyikapi aneka anomali relasi kekuasaan di Indonesia. Riset tulisan ini menggunakan metode pustaka. Kajian penulisan dilakukan dengan menelaah pustaka berkaitan dengan tema yang digarap. Dalam kajian tersebut, pertama penulis menganalisis secara kritis filosofis pemikiran Byung-Chul Han dalam karyanya ‘What is Power?’ sebagai buku utama yang khusus membahas kekuasaan dan aneka bukunya yang bertepatan dengan topik serupa. Kedua, penulis membaca beragam tulisan lain yang ada kaitannya dengan pokok bahasan yang digarap agar membantu memperkaya pembahasan artikel ini. Ketiga, data empiris seputar problematika relasi kekuasaan di Indonesia juga dikumpulkan dari berbagai sumber. Keempat, setelah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kekuasaan sebagaimana digagas oleh Byung-Chul Han, penulis mengonfrontasikannya dengan beragam fakta anomali kekuasaan yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Kelima, dari seluruh proses pada akhirnya ditemukan sumbangan besar ide kekuasaan Byung-Chul Han bagi gerak relasi kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan di Indonesia akan jauh lebih harmonis, adil, dan menyejahterakan semua bukan sepihak manusia apabila dibangun melalui kapasitas mediasi yang simetris.

2. Riwayat Hidup

Byung-Chul Han adalah seorang filsuf kontemporer berkebangsaan Korea Selatan. Ia dikenal sebagai seorang pribadi pendiam dan dalam dunia akademis terkenal sebagai ahli budaya Jerman, lahir di Korea Selatan pada tahun 1959. Han hingga saat ini menolak untuk memberikan dan membocorkan biografi, detail pribadinya, serta tanggal lahirnya di ruang publik. Ini kuat dipengaruhi oleh pandangannya tentang masyarakat transparansi (*the transparency society*). Menurutnya, ketentuan transparansi di jejaring sosial menegakkan sistem keterbukaan totaliter yang mana mengorbankan aneka nilai sosial, seperti; rasa malu, privatisasi, dan kepercayaan. Masyarakat transparansi, tulis sang filsuf adalah masyarakat pornografi (Han, 2015). Kritiknya yang tajam dan keras atas ‘nilai eksposur’ dalam masyarakat yang demikian membuat Han merahasiakan identitas pribadinya ke ruang publik. Meski demikian, media tetap membocorkan sebagian riwayat hidupnya.

Ia belajar metalurgi di Universitas Korea di Seoul sebelum pindah ke Jerman pada 1980-an untuk belajar filsafat, sastra Jerman, dan teologi Katolik di Freiburg im Breisgau dan Munich. Sebagai seorang pemuda yang mempunyai hasrat ingin tahu dan selalu mencari sesuatu yang baru, Han terdorong untuk ke luar dari kehidupan yang tidak tersedia di tempat asalnya, lalu pergi ke Jerman. “Struktur ekspektasi dan konvensi sosial tidak mengizinkan saya untuk hidup atau berpikir dalam cara yang sama sekali berbeda dan radikal,” ucapnya sebagaimana dilansirkan oleh *The Gadfly: City Journal* (Beauchamp, 2022). Pada usia 20 tahun, ia

memberitahu orangtuanya bahwa dirinya akan melanjutkan studi Metalurgi di Jerman, meski kenyataannya ia hendak belajar disiplin ilmu yang lain. Sehingga, Han harus berbohong kepada orangtuanya karena mereka tidak akan membiarkannya pergi. Ia tiba di Jerman dan mulai studi di sana tanpa mengetahui sedikit pun bahasa Jerman dan hampir tidak pernah membaca apa pun tentang filsafat. Bisa dikatakan ia sungguh belajar dari nol bahasa Jerman dan ilmu filsafat. Namun, dirinya sangat yakin dan percaya bahwa tanpa ketidaktahuan semacam ini kehidupan akan menjadi tidak mungkin. Sehingga, hanya dengan kondisi ketidaktahuan, kehidupan dapat mempertahankan dirinya sendiri dan berkembang. Prinsipnya, manusia tidak cukup menyadari ketidaktahuannya, tetapi harus memiliki keinginan untuk bodoh dan belajar lebih banyak.

Ia menerima gelar doktor di Freiburg dengan disertasi tentang Martin Heidegger pada 1994. Lalu bergabung dengan Departemen Filsafat di Universitas Basel pada tahun 2000, tempat di mana ia menyelesaikan habilitasinya. Setelah itu, Han menjadi anggota fakultas di Universitas Seni dan Desain di Karlsruhe, Jerman pada tahun 2010. Di sini ia bekerja sebagai dosen. Sejak 2012, ia mengabdikan diri dalam bidang filsafat dan studi budaya di Universitas Berlin dan ia dipercayakan untuk memimpin program studi umum *Studium Generale* yang baru didirikan. Pemikir kontemporer ini mengembangkan seluruh karier akademisnya di Jerman dalam dialog dengan berbagai intelektual yang terkemuka. Minat utama Han ialah filsafat abad ke-18, 19, dan 20 yang mencakup filsafat sosial, etika, teori budaya, fenomenologi, estetika, agama, filsafat antar budaya, dan teori media. Karya-karyanya ditulis dalam bahasa Jerman, lalu diterjemahkan ke dalam banyak bahasa terutama bahasa Inggris. Ia dianggap sebagai salah satu filsuf kontemporer yang paling menonjol karena kritiknya terhadap kapitalisme, masyarakat buruh, teknologi, dan transparansi yang berlebihan. Kritik pedasnya itu sangat kuat dan mudah ditemukan dalam karya-karyanya yang gemilang.

Han hingga sejauh ini belum menikah. Ia masih lajang dan tidak berkencan dengan siapa pun. Saat ini, ia lebih suka dan nyaman dengan dirinya sendiri, betah berada di rumah selain tempat mengajar dan tidak mau pergi jalan-jalan sebagaimana turis pada umumnya. Han banyak menghabiskan waktu di rumahnya untuk menulis dan mengelola kebun. Pengalaman sehari-hari dalam mengelola kebun ia refleksikan dan hasil permenungannya itu dituangkannya dalam sebuah buku dengan judul *"In Praise of the Earth"*. Selain itu, sang filsuf tidak memiliki *smartphone* dan ia hanya mendengarkan musik analog di tempat tinggalnya. Dengan gaya hidup radikal seperti ini, Han tidak bermaksud menolak semua yang ditawarkan oleh budaya modern-kontemporer. Ia hanya lebih percaya dan suka dengan keindahan asli (alamiah), seperti mencangkul daripada keindahan yang ditawarkan mesin dan alat canggih yang ditandai dengan hiperkonektivitas, namun membuat manusia menjadi budak dan bukan tuan atas dirinya.

2.1 Kekuasaan sebagai Relasi Ketergantungan Timbal Balik antara *Ego* dan *Alter*

Han menolak gagasan umum mengenai kekuasaan yang didasarkan pada prinsip kausalitas, di mana kekuatan *ego* adalah penyebab yang memengaruhi perilaku tertentu yang bertentangan dengan kehendak *alter*. Baginya, konsep umum tersebut tidak adil terhadap kompleksitasnya. Relasi kekuasaan harus disadari tidak selesai dan hanya sebatas daya untuk mematahkan perlawanan dan memaksakan kehendak untuk patuh. Kekuasaan juga hadir dalam bentuk tindakan tanpa pemaksaan kehendak. Artinya, kekuasaan dapat memanasifasikan diri dalam bentuk tindakan sukarela, yakni *alter* membuat keputusan untuk menerima kehendak yang berkuasa sebagai keinginannya sendiri.

Menurut Han, relasi kekuasaan yang didasarkan pada tindakan sukarela bukan dalam artian 'menetralkan kehendak'. *Alter* tidak menyejajarkan pilihannya dengan kehendak *ego* atas dasar kenyataan bahwa bagaimana pun pihak yang disubordinasikan (*alter*) harus tunduk pada kehendak yang berkuasa (*ego*). Tindakan sukarela melampaui netralisasi kehendak, yakni *alter* secara eksplisit menginginkan apa yang dikehendaki oleh pemegang kekuasaan. Ia mengikuti dan menerima kehendak *ego* seolah-olah sebagai kehendaknya sendiri. *Alter* dalam aktivitas itu

menginternalisasikan apa yang ingin diungkapkan oleh *ego* sebagai keputusannya sendiri dan merealisasikannya sesuai dengan kehendaknya.

Bagi Han, dasar ontologis dari tindakan sukarela ada pada kenyataan bahwa subyek kekuasaan adalah subyek yang independen, otonom, dan bebas. Sebagai subyek independen, orang yang dikenai kekuasaan dapat mengagungkan apa yang ingin dia lakukan. Obyek kekuasaan dalam keadaan apapun mampu menyatakan kehendak subyek kekuasaan dan melaksanakannya dengan 'ya!' sebagai *respon* yang tegas atasnya. Bukan 'aku harus bagaimanapun', akan tetapi 'aku ingin mengungkapkan kehadiran kekuatan yang lebih tinggi'. Bukan 'tidak' yang dalam, tetapi 'ya' yang tegas adalah tanggapan terhadap kekuatan yang lebih tinggi (Han, 2005). Demikianlah *alter* menghadirkan diri di hadapan kehendak *ego*. Ia bisa dengan penuh sukarela menegaskan dan menginternalisasikan kehendak penguasa sebagai tindakannya sendiri. Tujuannya ialah agar tercapainya kekuasaan simetris, adil, harmonis, dan tanpa represi.

Atas dasar itu, kekuasaan adalah fenomena yang berkaitan dengan model atau struktur mediasi (Han, 2005). Model pemaksaan hanya menampilkan mediasi yang sangat minim dalam relasi kekuasaan. Bagi Han, kekuasaan yang bersifat paksaan yang terdiri dari memaksakan keputusan dan kehendak sendiri *in se* bertentangan dengan kehendak orang lain. Selain itu model pemaksaan juga akan membuat *ego* tidak diterima dalam jiwa *alter* atau diterima tetapi bukan menjadi keputusan sukarela *alter*. Sementara model kekuasaan yang tidak memaksakan kehendak sendiri yang dibangun berdasarkan mediasi yang sangat tinggi jauh lebih stabil. Struktur kekuasaan demikian memungkinkan kekuasaan *ego* semakin mengakar, karena *alter* secara sukarela memutuskan mendukung kehendak *ego* seolah-olah sebagai kehendaknya sendiri.

Struktur kekuasaan yang dibangun atas mediasi tingkat tinggi biasanya disebut sebagai relasi kekuasaan simetris. Dikatakan simetris oleh karena relasi itu memuat ketergantungan timbal balik di antara subyek kekuasaan. Jika *ego* membutuhkan kerja sama dari *alter*, maka ketergantungan *ego* pada *alter* adalah hasilnya. Relasi kekuasaan yang simetris terjadi ketika subyek kekuasaan tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain, tanpa menggunakan kekerasan, dan tanpa ancaman sanksi apapun. *Ego* dalam hubungannya dengan *alter* tidak merumuskan dan memaksakan tuntutan tanpa mempertimbangkan *alter*.

Kekuasaan simetris sebagai relasi ketergantungan timbal balik selalu menempatkan *alter* setara dengan *ego*. Sebagaimana *alter* bergantung pada *ego*, demikian *ego* sepenuhnya pula bergantung pada *alter*. Ketergantungan *ego* pada *alter* dapat digunakan oleh *alter* sebagai sumber kekuatan. Dasarnya ialah *alter* mempunyai kuasa atas dirinya dan atas kehendak eksternal. *Alter* sebagai pribadi yang otonom memiliki pilihan untuk bereaksi saat berhadapan dengan kehendak *ego* yang bersifat memaksa. Ia berhak mengakhiri kerja sama dengannya yang akan menempatkan *ego* ke dalam situasi yang sulit.

Fenomena relasi ketergantungan timbal-balik antara *ego* dan *alter* bisa dilihat dalam tubuh pemegang kekuasaan seperti raja atau pemerintah yang berkuasa. Tubuh pemegang kekuasaan dapat kehilangan kekuasaan secara total seperti ia kehilangan wilayah kekuasaan secara mutlak ketika ketiadaan keterlibatan kehendak *alter* dalam keputusannya. Logika kekuasaan menjelaskan alasan kehilangan kekuasaan itu, yakni raja atau seorang pemimpin tidak hanya memiliki tubuh alamiah yang fana, tetapi juga tubuh politik-teologis yang sama luasnya dengan kerajaan dan negaranya. Dalam kasus kehilangan kekuatannya, dia dilemparkan kembali ke tubuh yang kecil dan fana. Sehingga, hilangnya kekuasaan dapat dialami sebagai semacam kematian. Jadi, tujuan kekuasaan sebagai relasi ketergantungan timbal balik antara *ego* dan *alter* ialah mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan itu sendiri.

2.2 Kekuasaan bukan Milik Subyek Tertentu

Menurut Han kesadaran kuno tampaknya mereifikasi kekuasaan menjadi substansi yang dapat dimiliki seseorang (Han, 2005). Kekuasaan direduksi menjadi kepunyaan subyek tertentu yang diperoleh dari prestasi memaksakan kehendak sendiri dan dari kemampuan menaklukkan

alter: Raja, penguasa negara, kaum kapitalis, dst, misalnya sering kali disebut sebagai pemangku kekuasaan yang cenderung mengeliminasi lawan dan siapapun yang di luar dirinya untuk keberlangsungan kekuasaan ke arah yang semakin kuat dan stabil. Han melihat pada abad ke-20 Foucault mulai membongkar cara pandang sempit demikian. Bagi Foucault, kekuasaan bukan milik subyek tertentu, tetapi milik semua orang dalam sebuah relasi kekuasaan (Bagus Riadi, 2020). Misalnya dalam kehidupan bernegara, kekuasaan bukan milik subjek tertentu atau pemimpin negara, melainkan juga kedaulatan rakyat. Kedaulatan dalam sebuah negara menjadikan pemerintah berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Segala kebijakan berdasar pada kebutuhan rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan kembali demi keuntungan dan kesejahteraan rakyat (Darusalam dan Indra 2021).

Senada dengan Foucault, Han menegaskan bahwa kekuasaan itu ada di mana-mana dan menyebar dalam setiap relasi manusia. Kekuasaan tidak ada dari dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri, tetapi berasal dari dan ada dalam setiap relasi, yakni dalam hubungan antara *ego* dan *alter*. Menurut Han, kekuasaan akan selalu eksis dalam relasi antara *ego* dan *alter* bukan ketika ketiadaan salah satu di antaranya. Tanda adanya kekuasaan justru ketika *ego* membiarkan eksistensi 'yang lain' hidup sebagaimana seharusnya. Bahkan kepenuhan kekuasaan *ego* selalu mengandaikan keikutsertaan kekuasaan 'yang lain'. Atas dasar itu, *ego* tanpa *alter* adalah ada tanpa kekuatan. *Ego* hanya mampu berada dan berkuasa sejauh eksistensi *alter* diakui.

Keberanian di atas melegitimasi pernyataan bahwa merendahkan dan membunuh pihak lain akan mengakhiri hubungan kekuasaan dan bahkan menghancurkan kekuasaan itu sendiri. Misalnya, dalam situasi di mana dua orang secara membabi buta menyerang satu sama lain, kekuasaan dalam arti yang sebenarnya hanya muncul setelah salah satu dari antaranya menyerahkan diri kepada 'yang lain'. Karena kemungkinan adanya kematian dari pertarungan itu akan berdampak pada kehilangan kekuasaan. Sehingga, kelanggengan kekuasaan justru terletak pada keputusan meniadakan tendensi memaksakan kehendak sendiri, menaklukkan, dan mengeliminasi *alter* dari hubungan kekuasaan.

2.3 Kekuasaan dan Kebebasan

Pembicaraan mengenai kekuasaan selalu bersinggungan dengan kebebasan. Ketika kita berbicara tentang kekuasaan, pada saat bersamaan pula ada wajah kebebasan muncul di dalam ranah pembicaraan itu. Bisa dikatakan, kekuasaan dan kebebasan merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Secara umum, kekuasaan dan kebebasan kerap kali hadir sebagai manifestasi dari dua kekuatan yang berbeda. Relasi keduanya adalah relasi saling menegasikan. Kekuasaan ada sebagai daya yang menegasikan kebebasan, sebaliknya kebebasan ada sebagai kekuatan yang meniadakan kekuasaan. Keduanya, baik kekuasaan maupun kebebasan adalah ada yang bersifat kontradiktif dan saling melenyapkan satu sama lain.

Han menolak cara pandang demikian. Berhadapan dengan problematika seperti itu, ia menegaskan bahwa sejatinya kekuasaan dan kebebasan tidak pernah ada untuk saling menegasikan. Sejalan dengan Foucault, menurut Han kebebasan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kekuasaan. Di mana ada kekuasaan di situ ada kebebasan. Kenyataan akan adanya kekuasaan di mana-mana sama sekali tidak meniadakan kebebasan. Kebebasan adalah unsur konstitutif dari kekuasaan, sebab kekuasaan dan kebebasan berasal dari satu kekuatan yang sama. Han menulis 'ada keyakinan keras bahwa kekuasaan mengesampingkan kebebasan. Tapi ini tidak terjadi' (Han, 2005).

Foucault dalam pembicaraannya tentang kekuasaan mencoba memisahkan hubungan kekuasaan dari tendensi dominatif dan represif dengan gagasan kebebasan. Baginya, kekuasaan tidak hanya mengandaikan kebebasan, tetapi kebebasan sungguh merupakan elemen pendukung penting dan utama dalam hubungan kekuasaan (Newman, 2022). Sehingga, kekuasaan hanya dapat diberikan atas subyek yang bebas dan subyek ini harus tetap bebas agar hubungan kekuasaan tetap ada. Dengan ini, perbudakan bukanlah relasi kekuasaan ketika manusia dirantai. Halnya karena tidak ada konfrontasi langsung antara kekuasaan dan kebebasan.

Menurut Han, gagasan Foucault demikian tidak cukup koheren dan masih terlalu kabur. Dalam konteks perbudakan, bahkan jika budak itu dirantai bagaimanapun juga tetap merupakan suatu hubungan kekuasaan. Budak masih mempunyai pilihan untuk mengatakan ‘tidak’, yakni menolak untuk menuruti tuannya bahkan ketika menghadapi ancaman kematian. Artinya, dalam pengertian ini budak yang dirantai juga bebas: dia masih memiliki pilihan antara kematian dan ketaatan. Sehingga, tidak penting apakah budak dirantai atau memiliki kemungkinan melarikan diri. Dalam hal pilihan untuk mengatakan ‘ya’ atau ‘tidak’ memuat praanggapan dari relasi kekuasaan (Han, 2019). Bahkan ketika berlawanan dengan kekerasan yang tidak memungkinkan untuk ‘ya’ atau ‘tidak’, yakni kekerasan yang mengesampingkan pilihan apapun dan mengubah ‘yang lain’ menjadi subyek yang benar-benar pasif, menurut Han relasi kekuasaan itu mengandung kekuasaan di dalam dirinya sendiri. Atau jika seseorang tunduk pada kekuasaan dan mematuhi tuannya secara mutlak di luar pilihan bebasnya, maka tetap pada prinsipnya ia memiliki pilihan untuk melawan. ‘Tidak’ adalah bagian dari bentuk perlawanan.

Dasar utama kebebasan manusia ialah dirinya sebagai subyek yang otonom. Sebagai subyek otonom, manusia adalah tuan atas dirinya. Ia mampu kembali ke dalam dirinya sendiri dan bertindak sebagai pribadi yang independen. Manusia dapat menginternalisasi sesuatu yang eksternal, yakni kehendak dari yang berkuasa dengan prinsip otonomisasi diri. Karena itu bagi Han kekuasaan bebas bukanlah *oxymoron* (Han, 2019). Dikatakan *alter* mengikuti *ego* ke luar dari kebebasan. Menurutnya, siapapun yang ingin mencapai kekuasaan absolut harus menggunakan bukan kekerasan, tetapi kebebasan orang lain. Jika hendak menciptakan kesinambungan diri tanpa represi, maka meski didasarkan pada prinsip kebebasan.

Kekuasaan tidak didasarkan pada represi dan kekerasan, tetapi kebebasan. Mengikuti logika kekuasaan Hegel, Han menulis ‘Tuhan adalah bebas karena Dia mempunyai kekuatan untuk menjadi diri-Nya sendiri’ (Han, 2019). Saat penciptaan, Ia mengekspresikan diri-Nya dengan menciptakan yang lain, yakni dunia. Dengan menciptakan yang lain, Tuhan melihat diri-Nya di dunia sebagai diri-Nya yang lain. Namun, penciptaan yang lain itu bukanlah transmisi sederhana ke yang lain, tetapi kembali ke diri-Nya sendiri tanpa perpecahan dan kekerasan di mana Ia bisa kehilangan diri-Nya sendiri.

Menurut Han, salah satu kekuatan konsep universal dalam dimensi ontologis kekuasaan adalah ‘kekuatan bebas’ (*free power*). Yang universal tidak memaksakan kehendak dirinya pada ada yang lain, tetapi membiarkan ada-ada itu tenggelam dalam esensinya sendiri. Biasanya, kekuatan bebas itu tampak ketika yang universal menjangkau ‘yang lain’ dan merangkulnya, ia tidak menemukan ‘tidak’ darinya. Sebaliknya, aktivitas menjangkau dan merangkul demikian ditegaskan oleh ‘yang lain’ sebagai kebenarannya sendiri. Yang dirangkul merangkul kehendak itu dan terbuka dengan mengatakan ‘ya’ atasnya. Sehingga, yang universal adalah kekuatan bebas. Saat menjangkau dan merangkul ‘yang lain’, ia tidak melibatkan kekerasan di dalamnya.

Ego dalam hubungannya dengan *alter* dapat dikatakan sebagai subyek yang bebas, yakni sejauh ia tidak menundukkan ‘yang lain’. Tetapi melepaskan atau membebaskan *alter* ke dalam hakikat adanya sendiri. Subyek kekuasaan bisa disebut sebagai subyek yang bebas apabila ia menjangkau dan merangkul orang lain tanpa menggunakan kekerasan. Jika ia berada di posisi sebagai subyek penguasa, ia akan diam dalam ‘yang lain’ seperti berada dalam dirinya sendiri. Sebaliknya, jika ia menempati posisi obyek, ia dengan bebas menyerahkan diri dan mematuhi kekuatan yang merangkul. Kekuasaan absolut tidak perlu menggunakan kekerasan, tetapi kebebasan *alter*. Karena itu, kebebasanlah yang menentukan relasi kekuasaan, bukan kekerasan (Goltz, 2020).

2.4 Kekuasaan tidak Identik dengan Kekerasan

Fakta adanya kekerasan dalam tubuh kekuasaan mendorong Han meneliti lebih jauh hakikat dan esensi kekerasan. Terutama dalam masyarakat demokrasi, kekerasan kerap kali dipandang sebagai manifestasi dari kekuasaan, sehingga kekerasan diidentikkan begitu saja dengan kekuasaan. Namun, apakah kekerasan sungguh identik dengan kekuasaan dan apakah

kekerasan merupakan unsur konstitutif dari kekuasaan? Para pemuja kekerasan (Weber, Marx, Sartre, dan lain-lain) menempatkan kekerasan sebagai instrumen ampuh untuk melanggengkan dan mengekspansi kekuasaan. Kekerasan digunakan oleh rezim penguasa tertentu untuk menundukkan 'yang lain' demi memperluas ruang kekuasaan.

Jika kita bertolak pada gagasan Arendt, maka pandangan para pemuja kekerasan tersebut tidak lagi relevan terutama ketika berhadapan dengan fakta semakin canggihnya perkembangan senjata dewasa ini. Laras senjata sama sekali tidak memosisikan penguasa sebagai subyek yang akan tetap bertahan ketika menghancurkan pihak yang dikuasa. Laras senjata menghadapkan baik penguasa dan yang dikuasa kepada kenyataan yang sama, yakni kehancuran total. Atas dasar itu, kehadiran senjata dalam relasi kekuasaan asimetris telah menghancurkan logika kekuasaan 'penguasa' dan 'yang dikuasai' yang sudah mapan selama ini. Saat berhadapan dengan laras senjata, semua subyek adalah penguasa dan kehilangan kekuasaan adalah konsekuensi akhir dari kekerasan yang terjadi. Sehingga, Arendt menolak kekerasan sebagai manifestasi dari kekuasaan dan unsur konstruktif kekuasaan (Ashcroft, 2021).

Han dalam konteks ini senada dengan Arendt, tetapi di sisi lain ia mengambil jarak dari gagasan terakhir Arendt yang masih memandang kekerasan sebagai instrumen yang dapat digunakan dalam situasi tertentu untuk menertibkan dan mempertahankan hasil konsensus bersama. Menurut Han, jika kekerasan itu terjadi sebagai akibat dari kegagalan subyek dalam membangun kekuasaan dengan *alter*, maka yang diperlukan ialah meningkatkan kembali kapasitas mediasi di antara keduanya. Kekerasan, bagi sang filsuf sama sekali tidak memadai untuk mengakhiri kekhasan yang ada dan bahkan menimbulkan konflik berkepanjangan.

Han dalam rangka menegaskan argumentasi demikian, mencoba membuat perbedaan antara kekerasan murni dan kekerasan dalam hubungannya dengan kekuasaan. Kekerasan murni menurutnya merujuk pada tindakan yang sama sekali bertentangan dengan kehendak manusia. Kekerasan murni berusaha sedemikian rupa memadamkan perbuatan, keinginan, bahkan kebebasan dan martabat orang lain. Tindakan kejahatan itu bertujuan untuk penghancuran total *alteritas* (Han, 2019). Hal ini bisa dilihat dalam kasus penyiksaan sewenang-wenang atau pembunuhan orang lain yang tidak masuk akal. Kekerasan murni bagi sang filsuf tidak identik dengan kekuasaan dan bertentangan dengan logika kekuasaan. Logika kekuasaan selalu melibatkan tindakan komunikatif dan kebebasan, meski itu bersifat asimetris sekalipun. Sehingga, berhadapan dengan persoalan semacam ini mesti diproses ke ranah hukum.

Sementara itu kekerasan dalam kaitannya dengan kekuasaan mengarah kepada relasi kekuasaan yang asimetris. Mediasi kekuasaan direduksi menjadi ketiadaan sehingga kekerasan ada sebagai sarana untuk menciptakan, memperluas, dan mempertahankan kekuasaan. Kekerasan di sini timbul dari ketidakmampuan subyek kekuasaan dalam membangun mediasi yang baik dengan 'yang lain'. *Ego* sama sekali tidak memiliki kekuatan atas *alter* (Han, 2019) dan melanggar keinginan *alter* dengan cara menjadikan kekerasan sebagai daya satu-satunya untuk menaklukkan *alter* di bawah kehendaknya. Menurut Han kekerasan demikian merupakan tanda impoten. Namun berbeda dengan kekerasan murni, relasi antara kekerasan dan kekuasaan dalam konteks ini, baginya masih termasuk dalam logika kekuasaan sebab tidak mengesampingkan kemungkinan perasaan kebebasan. Oleh karena itu, upaya untuk meniadakan ketimpangan relasi yang terjadi cukup dengan meningkatkan kapasitas mediasi kekuasaan, bukan kekerasan.

Berdasarkan argumentasi di atas, realitas adanya kekerasan yang kerap kali terjadi pada titik tertentu dalam sebuah relasi kekuasaan tidak bisa memutlakkan kebenaran klaim kekerasan sebagai manifestasi dan unsur konstitutif kekuasaan. Kekerasan itu memang ada dengan kemungkinan bisa menciptakan kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak didasarkan padanya (Han, 2017). Bagi Han, kekuasaan dalam arti yang sesungguhnya bukanlah pertarungan sampai mati, tetapi ketiadaan pertarungan itu. Sehingga untuk meniadakan kekacauan cukup dengan memaksimalkan kapasitas mediasi kekuasaan. Tindakan kekerasan entah dalam situasi apapun

tetap tidak bisa dijadikan alat untuk menghentikan dan mengakhiri ketimpangan relasi kekuasaan antara *ego* dan *alter*.

2.5 Kekuasaan dan Transendensi Diri

Kekuasaan sering kali membawa tanggung jawab sosial yang lebih besar. Ketika seseorang memiliki kekuasaan yang signifikan, ia diharapkan untuk bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi orang lain. Kekuasaan itu diberikan bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan sarana untuk pelayanan sosial bagi orang lain atau masyarakat (Suryono 2014). Tanggung jawab sosial ini dapat mendorongnya untuk melampaui kepentingan diri sendiri, mempertimbangkan kebutuhan orang lain, dan mencari tujuan yang lebih tinggi dalam hidupnya. Bagi Han, manusia mempunyai kemampuan untuk itu, yakni menyeberang ke arah 'yang lain' di luar dirinya. Menyeberang ke arah 'yang lain' adalah ciri dasar yang menandai keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Han menyebutnya transendensi diri. Transendensi diri merupakan aktivitas subyek kekuasaan yang meninggalkan dirinya sendiri berada dalam 'yang lain' tanpa kehilangan subyektivitasnya (Han, 2019). Melampaui diri sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk gerakan penguasaan dan pengatasan diri, tetapi pada saat bersamaan subyek yang berkuasa 'bersama dengan dirinya sendiri.' Menurut Han, semakin besar kekuatan untuk melampaui diri sendiri tanpa kehilangan diri sendiri, semakin besar dan kuat kekuasaan yang dimiliki seseorang.

Kekuasaan dapat memberikan individu kemampuan untuk mengubah lingkungan dan sistem yang ada. Melalui kekuasaannya, seseorang dapat menciptakan perubahan yang berdampak positif pada masyarakat, lingkungan, atau sistem yang dikuasainya. Keseluruhan kebijakan yang dijalankannya harus sesuai dengan hati nurani dan aspirasi rakyatnya. Ini artinya rakyat adalah pemegang penuh kekuasaan, rakyatlah pemegang kedaulatan, sementara pemimpin atau presiden adalah pelaksana dari kekuasaan yang diamanahkan oleh rakyat kepadanya (Kusmanto 2014). Kemampuan ini dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk mendorong perubahan yang mencerminkan nilai-nilai transenden seperti keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Kekuasaan yang ditandai dengan transendensi diri adalah kekuasaan yang dibangun atas dasar sikap keterbukaan yang total terhadap 'yang lain'. Di sana, subyek kekuasaan tidak menutup diri dan mengumpulkan segala sesuatu pada dirinya, tetapi menampakkan diri dan membiarkan *alter* hadir di hadapannya sebagaimana adanya. *Ego* dalam relasi tersebut sepenuhnya terbuka terhadap kebebasan *alter* entah apapun model penerimaan *alter* atas kehendaknya. Ia mentransendensi tendensi diri untuk memaksakan kehendak sendiri dan tidak menundukkan segala sesuatu yang ada di luarnya di bawah ruang kekuasaannya.

Han melihat bahwa kemampuan subyek kekuasaan dalam mentransendensi diri selalu bermuara pada perluasan ruang diri oleh karena *ego* memasuki wilayah kekuasaan *alter* dan menjadi bagian dari adanya. Namun, luasnya horizon kekuasaan *ego* tidak terlepas dari bagaimana *alter* menyambut kehadirannya. Pada prinsipnya, perluasan ruang diri atau kekuasaan menjadi semakin luas apabila pintu posibilitas *alter* terbuka lebar menyambut penampakan *ego*. Sehingga, keterbukaan total *alter* adalah kunci yang membuat *ego* semakin Menjadi, hidup, dan ada berkelanjutan dalam *alter*.

Selain itu, transendensi diri subyek kekuasaan juga menghasilkan kontinuitas diri tak berhingga. Subyek kekuasaan bisa menempati lebih banyak ruang dengan dirinya sendiri dalam 'yang lain'. Biasanya, kesinambungan diri yang tumbuh secara paralel dalam relasi kekuasaan akan menimbulkan kenikmatan, yakni perasaan senang. Namun, intensitas kenikmatan yang diperoleh itu pertama-tama tidak bergantung pada keterbukaan bermain atau keragaman bentuk permainan kekuasaan, melainkan karena didasarkan pada prinsip kebebasan. Artinya, perasaan bebas yang mendasari kontinuitas diri dalam *alter* adalah kunci utama kenikmatan *ego*, bukan pada tingkat keleluasaan *alter* menghendaki keputusannya (*ego*).

Bagi Han, kontinuitas diri tak berhingga yang tumbuh secara paralel dan simetris menegaskan kebenaran bahwa kekuasaan adalah soal hubungan ketergantungan timbal balik

yang kompleks dalam sebuah relasi kekuasaan. Kekuasaan bukan hanya itu yang dapat dijalankan terhadap ‘yang lain’, di mana kehendak diri dipaksakan kepadanya. Akan tetapi, kekuasaan juga bisa dilaksanakan di dalam dan melalui ‘yang lain’ dengan mediasi tertentu. Dalam relasi ketergantungan itu memuat kehadiran *ego* dan segala kehendaknya dalam *alter*, pun sebaliknya apa yang dilakukan *alter* adalah bukan semata kehendak yang paksakan dari luar, namun sungguh merupakan kehendak dirinya.

Jadi, kekuasaan bukan hanya sebatas daya yang dimiliki *ego* untuk menggerakkan *alter* bertindak seturut kehendak dan keinginannya tanpa kemauan *alter* (Henry-Priyono, 2021). Kekuasaan mempunyai arti lebih luas dan dalam dari itu, yakni eksistensi dan kehadiran *alter* memungkinkan *ego* melanjutkan dirinya di dalam *alter*. Bisa dikatakan, penghapusan dan penyesapan keberadaan *alter* adalah sebuah ekspresi ketiadaan kekuasaan *ego* untuk melanjutkan diri sendiri di dalam ‘yang lain’. Bahkan itu sebagai tanda lemahnya sebuah kekuasaan.

2.6 Kapasitas Mediasi Kekuasaan

Realitas sehari-hari sering kali menampilkan struktur kekuasaan yang berbeda-beda. Ada struktur kekuasaan yang bersifat asimetris yang ditandai dengan sikap dominatif, kekerasan, dan represif, ada pula struktur kekuasaan yang bersifat simetris. Sejatinya, keberlainan itu timbul dari dua kapasitas mediasi, yakni mediasi tingkat rendah dan mediasi tingkat tinggi. Pertama, mediasi tingkat rendah. Mediasi tingkat rendah adalah relasi kekuasaan yang lemah, minim, dan bahkan tidak memiliki mediasi (Zaaiman, 2020). Mediasi tingkat rendah hadir dalam relasi di mana *ego* sama sekali tidak memperhitungkan eksistensi *alter* sebagai pribadi yang otonom. Ia memaksakan kehendak dirinya tanpa persetujuan dari subyek yang dikuasai. *Ego* dalam relasi dengan mediasi yang minim sungguh-sungguh hanya mengutamakan segala kehendak diri agar dijalankan dalam *alter*. Ia tidak peduli apakah kehendaknya itu sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak *alter*.

Struktur kekuasaan yang bersifat asimetris selalu berdampak pada perasaan senang yang dialami secara sepihak terutama dari pihak pemegang kekuasaan. Perasaan senang itu muncul ketika subyek kekuasaan menegaskan keputusan dan pilihannya pada ‘yang lain’. Selain itu, Han melihat bahwa walaupun relasi kekuasaan antara *ego* dan *alter* minim dalam mediasi, hubungan tersebut masih menciptakan kesinambungan diri. Meskipun harus dipahami bahwa kontinuitas diri itu bukan merupakan kesinambungan diri internal, melainkan kesinambungan diri eksternal, karena *alter* sebagai pelaksana kekuasaan tidak menyetujui kehendak penguasa.

Menurut Han, relasi kekuasaan sebagai fenomena kontinuitas diri yang dipaksakan secara *natura* rapuh. Pihak lain akan mengalami kondisi yang sama sekali tidak dikehendakinya. Bahkan dalam konteks yang jauh lebih rumit dan problematis, relasi dengan minim atau tanpa mediasi kerap berakibat pada tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Nietzsche sebagaimana dikutip oleh Han menegaskan hal ini bahwa luka yang diderita oleh orang lain adalah ekspresi dari kekuasaan yang sangat kejam, yakni kekuasaan miskin mediasi (Han, 2019). Atas dasar itu, relasi kekuasaan dengan mediasi yang sangat rendah sama sekali tidak kondusif bagi keberlangsungan hidup ‘yang lain’. Relasi minim mediasi hanya akan membuat *alter* tercerabut dari martabatnya yang luhur dan bisa saja menyebabkan kehilangan hidup (nyawa).

Struktur relasi kekuasaan asimetris dapat dilihat dalam relasi tuan dan budak. Budak adalah sarana atau obyek kekuasaan dari penguasa, sedangkan tuan adalah subyek penguasa atas budak. Tuan sebagai seorang atasan mempunyai kekuasaan penuh atas budak. Sebaliknya, budak tidak memiliki kuasa atas tuan. Saat berhadapan dengan kehendak penguasa, budak sebagai seorang bawahan tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menyetujui kehendak tuannya secara buta. Di sinilah letak relasi kekuasaan asimetris dalam hubungan tuan-budak. Menurut Han, relasi kekuasaan asimetris antara tuan dan budak tidak pernah mencapai kontinuitas harmonis, selain hanya menghasilkan kontinuitas diri yang bersifat paksaan. Wajah keterpaksaan

kontinuitas itu tampak dalam disposisi tuan yang penuh kebebasan dan sukacita berada dalam budak, sementara budak tidak merasakan sukacita yang sama.

Bagi Han, distribusi asimetris kebebasan dan sukacita demikian membuat kekuasaan tidak stabil. Distribusi asimetris kebebasan dan sukacita hanya menempatkan *alter* seperti bahan pasif yang mengekspresikan kehendak *ego* (pemegang kekuasaan). Padahal, kekuasaan tidak semata-mata dapat dijalankan seperti itu. Relasi kekuasaan menjadi semakin harmonis dan simetris justru ketika *alter* membiarkan *ego* menginternalisasikan kehendak eksternal dengan penuh kebebasan. Atau kekuasaan akan dijauhkan dari tendensi mementingkan kehendak diri apabila *ego* tidak menaklukkan *alter* dengan mencetak atau memaksakan citranya sendiri terhadap 'yang lain'. Jadi, relasi kekuasaan simetris dan harmonis terjadi ketika *ego* menerima kehadiran *alter* sebagai bagian tak terpisahkan dari dirinya, demikian pun *alter* menyambut penampakan diri *ego* sebagai akunya yang lain (Han, 2019).

Kedua, mediasi tingkat tinggi. Pada prinsipnya, kekuasaan yang memiliki mediasi tingkat tinggi mampu menghasilkan perasaan senang dan bebas, baik dari pihak *ego* dan juga dari pihak *alter*. Hal ini lahir dari cara berada *ego* yang tidak memaksakan kehendaknya sendiri terhadap *alter*, tetapi melepaskan *alter* sebagai pribadi yang otonom untuk membuat keputusan yang tegas atas kehendaknya. Relasi kekuasaan dengan mediasi tingkat tinggi, menurut Han adalah sebuah hubungan yang memungkinkan *alter* mengintegrasikan kehendak atau pilihan *ego* ke dalam desainnya sendiri dan menyadarinya sebagai tindakannya. Sehingga, dalam relasi kekuasaan dengan mediasi tingkat tinggi kesinambungan diri biasanya tidak lagi bersifat paksaan tetapi dikehendaki *alter*.

Secara umum, struktur kekuasaan atas dasar mediasi tingkat tinggi dipandang sebagai sebuah cetusan dari kehendak bersama. Dikatakan kehendak bersama, oleh karena *ego* dan *alter* secara bebas tanpa paksaan menerima dan melaksanakan keinginan satu sama lain. Subyek kekuasaan tidak lagi mengabsolutkan kehendak pribadi, tetapi melenyapkannya dan hanya melaksanakan kehendak bersama, sehingga baik *ego* maupun *alter* masing-masing memperoleh perasaan bebas dan sukacita. Bagi Han, relasi kekuasaan demikian jauh lebih stabil daripada bentuk kekuasaan yang buruk atau minim dalam mediasi (Han, 2019). Dalam mediasi tingkat tinggi di mana keputusan *alter* diperhitungkan dalam kehendak *ego*, kekuasaan dan kebebasan menyatu. Kekuasaan mengalami stabilitas dan semakin menguat.

Selain itu, dalam relasi kekuasaan dengan mediasi tingkat tinggi, pengakuan timbal balik antara *ego* dan *alter* terjadi. *Ego* mengakui *alter* sebagai dia yang sederajat dengannya, pun sebaliknya *alter* mengakui eksistensi *ego* setara dengan dirinya. Karena itu tidak ada relasi asimetris di antara keduanya. Yang satu melaksanakan kehendak bagi dirinya sendiri untuk 'yang lain'. 'Yang lain' menyerahkan keinginan bagi dirinya sendiri bukan untuk dirinya. Artinya, selalu ada kehadiran kehendak 'yang lain' dalam keinginan diriku. Apa yang aku lakukan adalah tidak semata kehendak pribadiku, tetapi sekaligus bersama dengan kehendak 'yang lain'. Sehingga, kehendak 'yang lain' adalah kehendakku dan kehendakku adalah kehendak 'yang lain'.

Menurut Han, meskipun terdapat struktur kekuasaan yang berbeda oleh karena adanya dua kapasitas mediasi sebagaimana telah dijelaskan, eksistensi *ego* selalu memiliki potensi melanjutkan dirinya dalam *alter*. Kontinuitas diri itu didasarkan pada kenyataan bahwa manusia adalah pribadi yang inklusif. Ia adalah makhluk yang sejak keabadian dan kekekalannya terarah pada yang di luar diri dan dapat berada bersama 'yang lain' tanpa kelenyapan kediriannya masing-masing. Mengikuti Hegel, Han mengamini bahwa fakta inilah yang membedakan yang hidup dari yang mati. Makhluk hidup dapat menciptakan kontinuitas diri dalam 'yang lain', sementara makhluk yang mati mandul. Dan, makhluk hidup yang tidak memiliki kekuatan untuk bersatu dengan dirinya sendiri dalam 'yang lain' akan binasa. Sebab, tidak ada bedanya dengan yang mati yang impoten.

Oleh karena itu, bagi Han kekuatan prima makhluk hidup ada pada kenyataan bahwa *pertama*, manifestasi dirinya tidak pernah kehilangan dirinya sendiri dalam 'yang lain'. Artinya,

kehadiran *ego* dalam *alter* atau sebaliknya penampakan *alter* di hadapan kebebasan kehendak *ego* sama sekali tidak meniadakan subyektivitasnya masing-masing. *Kedua*, *ego* lebih ‘mencapai dan melampaui yang lain.’ *Ego* mempunyai daya untuk menempati ‘yang lain’ dengan dirinya sendiri, sehingga dapat melanjutkan dirinya sendiri dalam ‘yang lain’. *Ketiga*, aktivitas atau gerakan *ego* ke arah ‘yang lain’ tidak lain merupakan sebuah penziarahan kembali menuju diri sendiri. *Ego* menciptakan kesinambungan diri dengan menyeberang ke dunia *alter* atau apa yang ada di luarnya, tetapi pada saat bersamaan ia bersama dengan dirinya sendiri dalam yang lain. Inilah sifat dasar *ego* dalam kaitannya dengan *alter*, yakni ‘kembali ke dirinya sendiri.’

2.7 Kekuasaan sebagai Fenomena Batin dan Subyektivitas

Kekuasaan adalah fenomena batin dan subyektivitas (Han, 2019). Fenomena ini berangkat dari kenyataan bahwa subyek kekuasaan mempunyai apa yang disebut dengan ruang batin dan subyektivitas. Secara umum subyektivitas dimaknai sebagai inti terdalam diri manusia yang membuat ia mampu berdiri sendiri, independen, dan terpisah dari yang di luar diri (Heyes, 2010). Subyektivitas adalah sisi lain yang unik dan khas dari manusia. Inilah yang dikatakan Han sebagai ‘fondasi eksistensial manusia.’ Baginya, subyektivitas adalah itu yang mendasari seluruh relasi kekuasaan manusia sehari-hari. Subyek kekuasaan dalam relasinya dengan yang lain mampu berada terpisah darinya dan independen atas segala sesuatu yang berhubungan dengan eksistensi dirinya karena ia mempunyai sisi dalam.

Han melihat bahwa kekuasaan absolut tidak pernah ada pada subyek yang sulit masuk dan berdiam di dalam ruang batinnya serta bertindak seturut kehendak diri. Atau kekuasaan absolut pudar dan bahkan hilang dari manusia yang hanya bertindak patuh terhadap kehendak eksternal. Bagi Han, subyek kekuasaan yang menghadirkan diri tanpa menghidupkan sisi dalamnya atau tidak mampu menginteriorisasi sesuatu yang datang dari luar diri akan kehilangan subyektivitas. Ia akan tercerabut dari inti dirinya dan bertindak tanpa kesadaran akan adanya independensi diri. Atas dasar itu, kekuasaan absolut dalam pandangan sang filsuf hanya akan diberikan kepada seseorang yang mampu mengumpulkan kembali dirinya sendiri, mampu berlama-lama dalam interioritasnya atau berlama-lama di dalam dirinya sendiri, dan seseorang yang tidak memiliki sisi luar sama sekali (Han, 2019).

Menurut Han, subyektivitas merupakan unsur konstitutif dalam relasi kekuasaan manusia. Subyektivitas membantu manusia berani membuat batas tegas atas apa yang menjadi kehendak diri dan apa yang dikehendaki dari luar. Makhhluk organik selain manusia mungkin memiliki struktur terpusat, tetapi ia tidak akan mengembangkan struktur kekuasaan karena tidak digerakkan oleh subyektivitas dan memiliki ruang batin. Ruang batin menjadikan makhhluk organik (manusia) bertindak secara independen atas segala sesuatu.

Atas dasar itu, kehidupan manusia sama sekali tidak beroperasi seperti dorongan mekanis, di mana tubuh bergerak secara otomatis. Manusia bekerja dengan penuh kesadaran akan dirinya sebagai subyek yang independen. Ia bekerja bukan seperti sistem kerja mesin yang berjalan tanpa kesadaran diri. Mesin barang kali bergerak, namun bukan karena dirinya sendiri, melainkan bergerak atas gerakan dari luar yang menggerakkan. Ketika yang dari luar bergerak, ia secara otomatis bergerak seturut besarnya daya yang menggerakkannya. Subyektivitas sebagai unsur konstitutif dari kekuasaan dapat menggerakkan subyek kekuasaan berdiri dan hidup di atas keinginan diri sendiri dan menghendaki kehendak eksternal secara sukarela sejauh itu sesuai dan berdasarkan keputusan sendiri (Han, 2019).

Karakter utama manusia adalah memiliki dimensi interioritas. Ia mampu bereaksi secara independen terhadap penyebab eksternal. Manusia sebagai subyek yang otonom sanggup merespon kehendak dari luar, berbeda dengan makhhluk tidak bernyawa, seperti mesin, batu, dan lain-lain. Sehingga, letak kekhasan hidup manusia ialah ia mempunyai potensi untuk memotong penyebab eksternal, mengubahnya, dan membiarkannya memulai sesuatu yang baru dalam dirinya sendiri. Han menganalogikan proses internalisasi kehendak eksternal menjadi kehendak internal itu seperti makanan. Manusia hidup mungkin bergantung pada makanan,

tetapi makanan bukanlah penyebab kehidupan (Han, 2005). Artinya, jika kita berbicara tentang suatu sebab dalam konteks ini, maka kehidupan itu sendirilah yang memiliki kekuatan untuk mengubah apa yang ada di luarnya menjadi penyebab dari proses-proses organik. Karena itu, proses ini bukanlah pengulangan sederhana dari penyebab eksternal pada bagian dalam. Sebaliknya, sebuah pencapaian independen atau keputusan hidup yang independen. Subyek bereaksi secara independen menuju ke yang di luar dirinya.

Bagi Han, manusia sebagai subyek yang independen jauh dari kondisi pasif saat menderita penyebab eksternal. Jika penyebab eksternal mau mencapai efek, maka harus ada keputusan dari dalam. Fakta ini menegaskan absolutisme kebenaran bahwa sejatinya tidak ada kelanjutan langsung dari luar ke dalam seperti dalam kasus transmisi energi kinetik dari satu benda ke benda yang lain tanpa ada independensi diri. Mengutip Hegel, Han menulis 'subyek kekuasaan adalah dia yang mampu mengubah yang asing, yakni sesuatu yang ada di luar dirinya menjadi miliknya' (Han, 2019). Kemampuan tersebut didasarkan pada keberadaannya sebagai subyek yang independen.

Salah satu implikasi metafisis dari keberadaan manusia sebagai subyek independen ialah tampak pada poin ini bahwa setiap ide dan kehendak eksternal akhirnya dapat menjadi ide dan kehendaknya. Subyek kekuasaan bisa membentuk citranya sendiri atas yang eksternal dengan cara tidak lagi bertindak secara otomatis atau memutuskan hubungan langsung dengannya. Di samping itu, manusia sebagai subyek otonom juga boleh mengubah segala sesuatu yang mengalir dari kehendak *alter* dan menjadikannya sama dengan kehendak dirinya, sehingga terciptanya kesinambungan diri dalam 'kesamaan'. Dan harus diperhatikan bahwa proses internalisasi ini tidak perlu terjadi dengan cara kekerasan dan paksaan. Model kekerasan dan paksaan, yakni kehendak *alter* dipaksakan kepada *ego* pun sebaliknya *ego* memaksakan kehendak dirinya pada *alter* tanpa persetujuan bebas darinya hanya mewakili struktur kekuasaan tanpa kapasitas mediasi yang tinggi.

Relasi kekuasaan sehari-hari menampilkan kenyataan bahwa kehadiran *ego* selalu dibatasi atau dikelilingi oleh 'yang lain'. Bagi Han, penegasan diri sebagai itu yang menandai kemanusiaan manusia menjadi penting. Subyek kekuasaan harus tetap dengan dirinya sendiri ketika bersentuhan langsung dengan *alter*. Tanpa kemampuan kembali ke dalam diri sendiri, ke dalam ruang batin dan subyektivitasnya, manusia mutlak binasa oleh ketegangan negatif (paksaan) yang disebabkan dari luar dirinya. Independensi diri ada sebagai kapasitas makhluk hidup untuk tidak kehilangan dirinya sendiri saat terjerat dalam 'yang lain' dengan berbagai cara, sehingga subyek kekuasaan tetap melanjutkan dirinya sendiri sepanjang ketegangan negatif itu.

Menurut Han, subyek yang tidak mampu menyelesaikan negativitas, yakni menginternalisaskannya ke dalam *desain*nya sendiri tidak memiliki kemungkinan Menjadi. Mengutip Paul Tillich (1886-1965) seorang teolog dan sekaligus filsuf eksistensial Kristen, Han menulis 'seseorang akan mempunyai kekuatan untuk Menjadi selama dia mampu mengatasi kenegatifan atau ketegangan dari luar diri' (Han, 2019). Selain itu, subyek kekuasaan yang tidak bisa lagi mengatasi dan menanggung ketegangan dari luar bermuara pada ketidakberdayaan total dan semua kekuatannya dapat menjadi lumpuh. Sebaliknya, berhubungan dengan kemungkinan Menjadi, subyek yang mampu berlama-lama dalam hal negatif dan mengaktifkan kekuatan penegasan diri akan memiliki banyak kekuatan untuk Menjadi.

Sebagaimana Han memandang kekuasaan secara positif, ia menegaskan bahwa penegasan diri tidak harus sejalan dengan represi atau negasi orang lain (Han, 2005). Semuanya itu mesti bergantung pada tingkat mediasi. Biasanya, dalam kasus mediasi tingkat tinggi, penegasan diri tidak meniadakan atau mengecualikan, tetapi mengintegrasikan. Tentang ini Han melihatnya dalam konsepsi Hegel bahwa saat mediasi semakin intensif, subyek tidak lagi menghancurkan obyeknya (Han, 2019), namun internalisasi itu menghasilkan identitas dalam diri subyek dan obyek, sehingga obyek tidak sepenuhnya sebagai subyek lain.

Oleh karena itu, relasi kekuasaan yang ditandai dengan adanya keterlibatan independensi diri dan dimediasi secara intensif mengubah struktur kekuasaan lama yang cenderung berciri kausalitas-represif. Kekuasaan, jika kita bertolak dari gagasan Han, tidak lagi menjadi milik subyek tertentu yang merengkuh obyek untuk kembali ke dirinya sendiri di dalamnya. Kekuasaan adalah kekuatan universal yang memanifestasikan dirinya dan yang menyatukan setiap individu, di mana subyek dan obyek menjadi satu, membentuk sebuah totalitas. *Ego* memanifestasikan dirinya dalam *alter* pun sebaliknya *alter* melihat dirinya sendiri dalam *ego*. Apa yang dikehendaki *ego* dan *alter* dengan demikian adalah kehendak bersama.

2.8 Etika Kekuasaan

Relasi kekuasaan tidak akan pernah terlepas dari tendensi menaklukkan segala sesuatu yang berada di luar ke dalam diri sendiri. Han menggunakan istilah 'ipsosentris' yang artinya 'kekuasaan terpusat' untuk menggambarkan hal ini. Ia menyadari subyek kekuasaan cenderung menarik dan mengumpulkan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Atau *ego* kerap kali memutlakkan kekuasaannya dan menegaskan keberadaan *alter*, sehingga melemparkan *alter* ke dalam situasi yang sangat sulit. Pada prinsipnya, tendensi 'ipsosentris' tidak menimbulkan persoalan jika dibangun atas dasar tingkat mediasi yang tinggi. Masalah muncul ketika kehendak pribadi menjadi dominan dalam relasi kekuasaan dan yang bersebelahan atau di luar diri ditarik sedemikian rupa secara mutlak demi kepuasan pribadi.

Pada titik inilah pertanyaan tentang dimensi etis kekuasaan muncul dalam hubungannya dengan strukturnya sebagai suatu perkumpulan, yakni kekuasaan terpusat. Bagaimana semestinya *ego* menghadirkan dan menempatkan diri dalam relasi dengan *alter* terutama berhadapan dengan kecenderungannya untuk mengumpulkan segala sesuatu pada dirinya sendiri dan pada satu pusat? Di satu sisi, relasi kekuasaan memang mempunyai kapasitas mediasi, namun tetap ada batasnya di lain sisi. Apalagi jika hasrat itu membabitkan untuk mempertahankan kehendak diri, maka akan mengarah kepada kejahatan mutlak. Berhadapan dengan problematika semacam ini, Han melihat perlunya dimensi etis kekuasaan.

Pertanyaan yang dapat diajukan kemudian ialah apa pandangan etis kekuasaan Han. Kekuasaan bagi Han merupakan hubungan ketergantungan timbal balik antara *ego* dan *alter*. *Ego* sebagai subyek penguasa dalam relasinya dengan 'yang lain' tidak memaksakan kehendaknya tanpa membiarkan keputusan bebas dari *alter*. Ia melepaskan *alter* hidup dalam alamnya sendiri dan memastikan bahwa eksistensi *alter* tidak terintimidasi dan terhimpit oleh kehendaknya (*ego*) pun kehendak yang lain. Han melihat bahwa dimensi etis kekuasaan itu harus melebihi perjuangan *ipsosentris*. *Ego* mesti membuka diri bagi *alter*. Ia sebagai subyek penguasa harus bersedia memberi ruang kepada orang lain dengan keramahan asli (Rizal, 2019). Artinya, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada *alter* untuk mencetuskan diri bukan dalam nada keterpaksaan, melainkan dengan penuh kebebasan batin.

Selain itu, dimensi etis dalam gagasan kekuasaan Han juga berbicara tentang keberanian *ego* untuk menahan diri terhadap keinginan mengutamakan kehendak pribadi dan bergerak ke luar memperjuangkan kehendak *alter*. Titik tolaknya ialah adanya kesadaran *ego* bahwa kehadiran yang lain memuat makna yang sangat mendalam dalam sebuah relasi kekuasaan. Sehingga, apabila dalam relasi kekuasaan ia menyadari ada hasrat untuk menarik secara mutlak segala sesuatu yang di luar diri ke satu arah yakni diri sendiri, maka kemampuan menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak pantas dikumpulkan dan diambil adalah sebuah keutamaan (Han, 2019).

Karena itu, etika kekuasaan Han didasarkan pada keutamaan keadilan dan keramahan. *Pertama*, keadilan. Keadilan adalah bukti nyata dari keterbukaan total *ego* terhadap *alter*. Keadilan adalah keutamaan yang bisa menciptakan gerakan yang bertentangan dengan kekuasaan yang bersifat *ipsosentris* (Han, 2019). Keadilan ada untuk memberikan kepada setiap pribadi miliknya. Menurut Han, orang yang berkeutamaan keadilan adalah dia yang mempunyai kesediaan hati mendengarkan *alter* daripada diri sendiri. Ia tidak menarik segala sesuatu pada

dirinya sendiri, tetapi terbuka terhadap pluralitas dan bahkan yang bertentangan demi terwujudnya kepentingan semua orang.

Dalam sebuah relasi kekuasaan, keadilan membuat subyek kekuasaan mampu mendengar lebih banyak, melihat lebih banyak, melampaui keyakinan sesaat dirinya yang selalu mengandung keyakinan untuk diri sendiri. Orang yang adil biasanya rela menyimpan penilaian pribadi dan mudah menjauhkan kehendak diri yang selalu terlalu dini agar tidak merugikan orang lain. Sementara, orang yang tidak memiliki keutamaan keadilan adalah dia yang digerogoti oleh hawa nafsu. Sehingga, sikap terbuka dan adil adalah gerakan terpuji untuk menyingkapkan selubung keterpurukan itu. Singkat kata, keadilan adalah sebuah langkah pantang terhadap segala kehendak diri demi keberlangsungan eksistensi 'yang lain'.

Kedua, keramahan. Keadilan saja tidak cukup untuk menjamin terciptanya relasi kekuasaan simetris (Han, 2005). Keramahan tanpa batas menyambut semua orang tanpa perbedaan juga menjadi hal yang sangat penting. Keramahan membantu subyek kekuasaan memberikan kepada masing-masing orang melebihi kepemilikannya atau melampaui prinsip keadilan. Inilah perbedaan antara keadilan dan keramahan. Jika keadilan memberikan kepada masing-masing subyek miliknya, maka keramahan mengatasi itu.

Selain itu, keramahan tanpa syarat juga berseberangan dengan jenis persahabatan yang melihat dalam diri seorang sahabat hanya sebagai 'diri yang lain'. Karena melihat *alter* hanya sebatas sebagai 'aku yang lain' tidak sepenuhnya menampung kedalaman makna keramahan. Keramahan selalu mengatasi jenis ekonomi persahabatan. Keramahan tidak timbul dari dorongan yang dihasilkan oleh karena kehendak bertindak adil dan kelebihan kekuasaan. Menurut Han, di sinilah letak persoalan keramahan dari Nietzsche. Ia pada akhirnya jatuh pada kecenderungan melihat keramahan sebagai cetusan dari 'kekuasaan yang meluap-luap'. Nietzsche menulis: "Apa yang membuat seseorang berpaling dari dirinya sendiri dan mengarahkan diri kepada yang lain? Apa yang menyebabkan yang berkuasa melampaui keramahan aristokrat dan mengadopsi keramahan tanpa pandang bulu, tanpa syarat, dan asimetris? Jawabannya tidak lain ialah demi penghargaan diri" (Han, 2019). Dalam memberi, yang berkuasa menikmati dirinya sendiri. Sehingga menurutnya keramahan merupakan ekspresi tertinggi kekuasaan.

Han beranjak lebih jauh dari cara pandang Nietzsche demikian. Ia justru melihat bahwa keramahan jika berdasarkan pada cinta, maka itu tidak mungkin lagi memikirkan diri sendiri. Ketika *ego* memberi dan memperoleh kenikmatan darinya, kenikmatan diri yang melimpah menjadi tidak mungkin karena luapan seperti itu menghanguskan diri. *Ego* membagi diri dan menyeberang ke diri *alter* tidak pernah keinginan itu *in se* untuk memperoleh kenikmatan sepihak. Cinta melenyapkan keegoisan diri saat memberi. Cinta selalu merangkul dan menjaga subyek dan obyek kekuasaan. Ia mampu melakukan transendensi diri dan melupakan keinginan untuk diri sendiri demi orang lain (Han 2017). *Ego* mungkin saja merasakan kenikmatan pada saat itu. Namun yang dikejarinya jauh melebihi itu, yakni keberlangsungan hidup *alter*, bukan penghargaan diri. Keramahan berdasarkan cinta melumpuhkan permusuhan, tendensi dominatif, dan absolutisme kehendak.

Bagi Han, keramahan bukanlah properti intrinsik untuk kekuasaan. Adanya bukan sesuatu yang memang demikian sejak semula. Sebaliknya, kekuasaan harus disentuh oleh 'sesuatu yang bukan bagian dari dirinya sendiri' agar dapat melakukan mediasi di luar kapasitas mediasinya sendiri. 'Sesuatu' itu adalah 'suara yang ilahi'. Dia-lah yang memanggil subyek kekuasaan untuk menyerahkan diri, mengosongkan dirinya dan menjadi bukan siapa-siapa dalam relasi dengan 'yang lain'. Dalam kaitannya dengan kapasitas mediasi, keramahan juga merupakan sebuah jenis mediasi dan bahkan bentuk mediasi yang intens. Tetapi, ia tidak memiliki kekuatan intensional, yaitu kedalaman subyektivitas (Han, 2019).

Subyek kekuasaan yang memiliki keramahan adalah dia yang selalu mendahului kepedulian dan rasa empati terhadap 'yang lain'. Keramahan bebas dari aneka niat dan keinginan

untuk 'yang lain', karena keramahan itu tanpa syarat dan selalu mendahului niat dan keinginan yang ada. Keinginan yang melekat dalam tubuh kekuasaan, bagi Han tidak pernah menimbulkan 'perasaan berkecukupan'. Ketika subyek kekuasaan berkehendak memberi diri dan ke luar menuju kepada *alter*, keramahan tidak hadir bersamaan pada saat niat itu ada tetapi selalu mendahuluinya. Keramahan dalam pandangan Nietzsche menurut Han masih berkisar pada wilayah 'ipsosentrisme'. Karena sifatnya yang *ipsosentris*, ia tidak mampu memberikan keramahan tanpa batas yang membuka dirinya untuk siapapun tanpa niat dan keinginan tertentu.

Singkatnya, kekuasaan etis adalah kekuasaan yang didasarkan pada keadilan dan keramahan tanpa syarat. Subyek kekuasaan bertindak atas keutamaan keadilan dan keramahan. Ia menjalankan kekuasaan tanpa tindakan semena-mena, tanpa tidak memperhatikan kehadiran kehendak yang lain, dan tanpa tidak mengutamakan kesejahteraan subyek yang dikuasa. Kekuasaan dikatakan etis ketika subyek kekuasaan mengabdikan masyarakat, bertindak adil, ramah, demokratis, dan menyejahterakan semua, bukan sepihak. Dalam hal ini subyek kekuasaan berkolaborasi dengan masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri (Riyanto dan Kovalenko 2023).

3. Sumbangan Konsep Kekuasaan Byung-Chul Han dalam usaha Meminimalisir Anomali Kekuasaan di Indonesia

Penulis pada bagian ini akan secara khusus membahas sumbangan pemikiran Han mengenai kekuasaan dalam menyikapi beragam anomali relasi kekuasaan di Indonesia. Sebagai makhluk sosial, manusia Indonesia tidak pernah terlepas dari kebutuhan dasarnya, yakni ada bersama 'yang lain'. Kodrat sosialitas itu nyata dalam aneka bentuk relasi yang dibangun dan salah satu cetusannya ialah kekuasaan. Kekuasaan dapat dikatakan produk konkret dari kehendak bersama dari sebuah relasi (Atthahara, 2020). Ia memiliki sifat dasar konstruktif dan mengakomodir kehendak setiap pribadi, di mana tidak ada aspirasi yang dieliminasi akibat tindakan dominatif kehendak subyek atau kelompok tertentu. Sehingga, pada prinsipnya kekuasaan hadir dalam wajah kesederhanaan, keramahan, dan ketulusan. Ia ada demi terwujudnya *common good* bagi setiap subyek kekuasaan.

Namun, jauh dari konsep ideal tersebut, kekuasaan yang selalu menorehkan dirinya ke dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah terlepas dari aneka ketimpangan. Masyarakat Indonesia kerap berada dalam dan terhimpit oleh beragam tindakan dominatif, represif, kekerasan, ketidakbebasan, dan termasuk KKN sebagai akibat langsung dari mirisnya relasi kekuasaan yang ada. Realitas pelik ini dapat ditemukan dengan mudah dalam relasi antara pemerintah dan rakyat, atasan dan bawahan di berbagai instansi atau komunitas tertentu, relasi antara mayoritas vs minoritas, dan sebagainya. Menurut Han, fenomena demikian tidak lain menampilkan adanya relasi kekuasaan asimetris antara subyek yang berkuasa dan subyek yang dikuasa. Atas dasar itu, penulis mengusung konsep kekuasaan Han sebagai pisau bedah terhadap aneka praktik anomali relasi kekuasaan yang ada di Negara Indonesia. Penulis meyakini gagasan kekuasaan Han memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia dalam membangun hubungan kekuasaan yang lebih harmonis dan simetris di kehidupan nyata sehari-hari.

3.1 Kebebasan: Dasar Relasi antara *Ego* dan *Alter* di tengah Isu Mayoritas vs Minoritas

Manusia adalah subyek bebas. Sebagai subyek bebas, ia selalu terdorong untuk mengekspresikan dirinya dengan penuh kebebasan dalam kehidupan sehari-hari tanpa aneka belenggu dari pihak lain (Dister, 1991). Dasar kebebasan manusia ialah kodrat dirinya sebagai makhluk berakal budi. Sebagai *animal rationale*, kebebasan merupakan sesuatu yang intrinsik ada dalam setiap relasi kekuasaan oleh karena perjumpaan itu terdiri dari subyek-subyek yang rasional. Atas dasar itu tidak heran jika Han menegaskan bahwa di mana ada kekuasaan, maka di sana selalu ada kebebasan. Dalam konteks negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia prinsip kebebasan tidak dapat diragukan lagi. Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sana prinsip-prinsip dasar demokrasi mendapatkan aksentuasi yang

sangat kuat, seperti kebebasan berpendapat, berpikir, dan beragama. Misalnya, tentang kebebasan beragama di atur dalam pasal 28 E ayat 1, 2 dan pasal 29 ayat 2.

Namun, realitas sehari-hari kerap kali menghadirkan kenyataan berseberangan. Kekuasaan tidak sedikit menyingkirkan kebebasan seseorang. Atau kebebasan seseorang sering kali dibatasi oleh kekuasaan orang lain (Soewandi dan Wijanarko 2021). Tendensi dominatif kekuasaan oleh subyek atau kelompok tertentu menjadi semacam dinding dan tembok penghalang bagi kebebasan yang lain. Akibatnya, subyek yang dikuasai tidak mampu merealisasikan diri dengan baik karena ada kekuatan penguasa berbatasan dengan dirinya. Tentang hal ini, kita dapat melihatnya dalam isu mayoritas *vs* minoritas sebagaimana kerap terjadi di tanah air Indonesia. Penulis mengangkat kasus mayoritas-minoritas oleh karena dalam konteks Indonesia masalah tersebut terus menjadi keprihatinan bersama meski banyak solusi dari berbagai sudut pandang sudah ditawarkan. Boleh dikatakan, persentase ketimpangan relasi kekuasaan antara kaum mayoritas dan minoritas masih berada di angka yang cukup besar. Di satu sisi ada gerakan pembaharuan menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, di sisi lain kaum mayoritas sebagai yang berkuasa tidak sedikit bertindak semena-mena atas yang minoritas. Sikap demikian tidak jarang mencabut atau membatasi kebebasan kaum minoritas dalam mencetuskan diri sebagai makhluk bermartabat (Mubarak, 2020). Bahkan obyektivasi subyek minoritas oleh subyek mayoritas tidak hanya berdampak negatif secara psikologis (merasa represif, takut, dan lain-lain) tetapi juga secara fisik (luka atau kematian).

Pada umumnya, tendensi dominasi kekuasaan dari kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas yang terjadi di Indonesia berlatar identitas tertentu, seperti suku, ras, dan agama (SARA). Hal ini karena Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, ras, dan agama. Berdasarkan data yang ada, Negara Indonesia terdiri dari 300 lebih suku bangsa, 500 lebih bahasa, dan 17.000 lebih pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, serta terdiri 6 agama besar yang diakui (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu) termasuk agama/kepercayaan tradisional yang tersebar di berbagai tempat. Fakta adanya keanekaragaman ini seyogyanya bukanlah merupakan perbedaan yang harus dipertentangkan. Perbedaan dan keragaman adalah peluang yang memungkinkan terjadinya kerja sama demi meningkatkan harkat dan martabat manusia, baik secara personal maupun secara kolektif (Wijanarko dan Saeng 2022). Akan tetapi, di lain tempat kenyataan perbedaan dan keanekaragaman menggelisahkan karena sering menjadi sumber segala persoalan (Harjon, 2023).

Catatan sejarah menunjukkan, misalnya kaum mayoritas dengan identitas tertentu terkadang menindas kaum minoritas yang memiliki identitas berbeda. Realitas demikian bisa disimak dalam beberapa kasus berikut ini. *Pertama*, terkait masalah antara suku; konflik Sampit antara Dayak dan Madura, Sambas, Ambon, Poso, dan berbagai konflik lain antardaerah di berbagai tempat. *Kedua*, isu ras; misalnya konflik antara kaum pribumi dan masyarakat Tionghoa. *Ketiga*, mengenai isu agama; kasus di Maluku, di Papua, dan aneka konflik lain antara pemeluk agama di berbagai wilayah. Beragam kasus tersebut menuai banyak korban bahkan hingga menelan nyawa terutama anak-anak yang tidak bersalah. Melihat fenomena tragis demikian, nampaknya konsep kekuasaan di era reformasi dewasa ini masih saja dimaknai secara negatif oleh sebagian orang atau kelompok.

Jika kita bertolak pada pemikiran Han di mana kebebasan harus menjadi dasar dari sebuah relasi kekuasaan, maka kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kaum mayoritas tidak boleh menaklukkan kebebasan kaum minoritas entah dalam aspek apapun. Kekuasaan kaum mayoritas harus menjadi daya yang bisa merangkul dan melindungi kaum minoritas dari aneka persoalan kehidupan. Bukan sebaliknya, kekuasaan kaum mayoritas justru menjadi senjata yang mengancam kebebasan kaum minoritas. Selain itu, subyek kekuasaan (mayoritas) mesti mempunyai kesadaran akan keberadaan satu sama lain. Kehadiran subyek kekuasaan yang berasal dari luar lingkaran eksistensi diri atau kelompok harus disadari dan diakui sebagai 'bukan

mereka', melainkan 'aku yang lain' (Wijanarko, 2021). Sehingga, apa yang disebut 'keramahan' oleh Han mendapat tempat, oleh karena semua yang berlainan denganku diterima tanpa pandang bulu sebagaimana aku bertindak atas diriku.

Spinoza dalam bukunya berjudul *Ethics* menulis demikian: "Hanya manusia bebas yang sungguh-sungguh saling menguntungkan satu sama lain dan bersatu dalam persatuan yang erat serta sama-sama termotivasi oleh cinta dalam usaha untuk saling menguntungkan" (2002). Artinya, kebebasan menjadi unsur fundamental yang memungkinkan relasi kekuasaan antara *ego* dan *alter* dapat berjalan secara harmonis, simetris, dan adil. Penulis sependapat dengan Han bahwa relasi kekuasaan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas semakin bebas, bermartabat, dan menyejahterakan satu sama lain hanya jika itu dibangun atas dasar kebebasan. Atas dasar itu prinsip kebebasan perlu ditegakkan agar 'yang lain' tidak merasa represi, terintimidasi, dan dapat merasakan kedamaian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

3.2 Transendensi Diri Subyek Kekuasaan: Menangkal Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Manusia tidak pernah terlepas dari hasratnya untuk mengumpulkan dan menarik segala sesuatu ke dalam dirinya sendiri. Di satu titik, aktivitas merengkuh segala yang berada di luar diri baik untuk kelestarian diri. Namun di lain titik jika itu tanpa mediasi yang baik akan meniadakan eksistensi 'yang lain', karena aku tidak lagi memperhitungkan keberlangsungan *alter* selain menegaskan kepentingan diriku sendiri. Yuval Noah Harari dalam bukunya berjudul *Sapiens* menegaskan bahwa ribuan tahun yang lalu manusia adalah dia yang tertutup dan hanya berkuat dengan urusannya sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, ada sebuah gerakan menuju ke 'yang lain' (Harari, 2015) Akan tetapi sungguh menyedihkan, menurut Harari tindakan kepedulian terhadap yang di luar diri tersebut tidak banyak menyejahterakan sesama melainkan malah menguasainya dan bermuara pada penderitaan. Pada titik inilah, transendensi diri perlu digaungkan agar seseorang mampu menyeberangi hasrat kebinatangannya yang terlampau naif. Transendensi diri membantu *ego* untuk terbuka terhadap kehadiran *alter* dan aneka kepentingan bersama demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua orang (Pandor, 2020).

Menurut penulis, persoalan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah salah satu dampak dari ketidakmampuan subyek kekuasaan dalam melakukan transendensi diri atas tendensi *ipsosentrisme*. *Pertama*, korupsi. Korupsi berakar pada kata *corrupt* dari bahasa Latin *corruptus* yang berarti serangkaian gambar jahat. Secara harafiah korupsi dipahami sebagai ajakan untuk bertindak menyimpang (Klitgaard, 1998) dari tugas-tugas resmi pejabat negara karena keuntungan tertentu, seperti status dan uang (Miller, 2016). Simak saja kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan (Rp300 triliun), pengadaan e-KTP (Rp6 triliun), Gusti Dula (Rp3 triliun), dan lain-lain. *Kedua*, kolusi. Kolusi adalah sebuah bentuk kerja sama demi suatu tujuan yang tidak bermoral. Persekongkolan itu dilakukan secara rahasia dan pada umumnya berdampak pada langkahnya pemerataan dan maraknya ketidakadilan. Tindakan tersebut dapat berupa suap menyuap demi sebuah jabatan/posisi tertentu. *Ketiga*, nepotisme. Nepotisme adalah sebuah tendensi mementingkan kekuasaan untuk keluarga sendiri terutama dalam tubuh pemerintahan. Sikap itu tampak ketika sanak saudara sendiri diberikan jabatan tertentu untuk menduduki kursi pemerintahan.

Dari beberapa pengertian di atas kita dapat melihat bahwa tindakan KKN kerap kali tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi juga menjadi tindakan kolektif. Orientasinya jelas, yakni baik demi tercapainya kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok sendiri (Izziyana, 2019). Lazimnya, tindakan KKN sangat merugikan banyak orang dan membawa bangsa ke jurang kemelaratan, kemiskinan, dan keterbelakangan (Kaelan, 2018). Masalah demikian membuat bangsa kehilangan identitas dirinya sebagai bangsa bermartabat yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai moral (Wangga et al., 2019). Berdasarkan hasil jajak pendapat *Litbang Kompas* pada awal Oktober 2022 lalu, kebanyakan responden (78,7%) belum memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Bahkan sepertiga di antaranya menilai lembaga perwakilan rakyat sama sekali belum mengakomodasi kehendak masyarakat

(Nugraheni, 2022). Subyek kekuasaan kerap jatuh ke dalam cobaan memosisikan diri sebagai pusat segala sesuatu, hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, dan menutup mata terhadap tuntutan-tuntutan yang wajar dari orang lain (Zamzuri, 2018).

Dalam terang pemikiran Han, seperti yang telah disinggung di awal bahwa persoalan semacam ini masuk dalam wilayah kegagalan subyek kekuasaan dalam melampaui diri sendiri demi menuju 'yang lain'. Subyek kekuasaan terlalu menutup diri dan ataupun membuka diri hanya sejauh untuk menarik segala yang berdekatan demi kebahagiaan pribadi atau kelompok (Gule, 2021). Atas dasar itu, subyek kekuasaan perlu melakukan transendensi diri agar tidak memaksakan kehendak diri sendiri tanpa mempertimbangkan 'yang lain' (masyarakat pada umumnya) dalam menjalankan roda kekuasaan. Transendensi diri itu penting supaya subyek kekuasaan bisa menyeberang dan melampaui dominasi kehendak menyejahterakan diri atau kelompok sendiri. Melainkan lebih mengutamakan kehendak 'yang lain' atau semua orang agar tercapainya kesejahteraan dan kebaikan umum sebagaimana yang menjadi cita-cita bersama.

Pada dasarnya perjuangan mengutamakan kepentingan semua orang mengandaikan adanya kesadaran diri akan adanya keberadaan *alter* di luar diriku (Ngatun & Adry Yanto Saputra, 2020). Kesadaran itu tidak hanya sebatas pengenalan semata, tetapi harus sampai pada pengakuan bahwa penampakan *alter* membawa serta aneka kehendak, hak, dan kebutuhan yang mesti dihargai dan dipenuhi sebagai makhluk bermartabat (Soebagiyo, 2020). Dalam relasi kekuasaan, perjumpaan dengan 'yang lain' (masyarakat) semestinya membuat subyek kekuasaan (pemerintah) merasa 'terganggu'. Ada semacam gugatan dari dalam diri untuk meninggalkan diri sendiri atau sikap egoisme demi merangkul dan bertanggungjawab atas kesejahteraan orang lain (Valerian, 2021). Ia bahkan harus sampai rela berkorban dan selalu berada dalam perjalanan mencari untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat kebanyakan (Hamudy, 2022). Singkatnya, kekuasaan meminta aku ke luar dari lingkaran mementingkan diri sendiri (Jauhari, 2016), meski tanpa kehilangan subyektivitasku demi kepentingan yang lebih besar, yakni semua rakyat.

Bagi Han, jika subyek kekuasaan mampu menyeberang ke luar kepada kesejahteraan bersama dan meninggalkan keinginan untuk diri sendiri, maka pada akhirnya bermuara pada kontinuitas diri. Subyek kekuasaan dapat melanjutkan dirinya sendiri dalam diri 'yang lain' di luar dirinya. Dalam konteks pemerintah yang berkuasa misalnya, subyek yang berkuasa bisa berada dalam pihak yang dikuasai dan keduanya sama-sama mengalami kesejahteraan. Pemerintah yang berkuasa tidak hanya menikmati dan melihat kesejahteraan itu di dalam dirinya sendiri, tetapi juga melihat kesejahteraan itu ada di pihak rakyat karena aneka hak dan kebutuhan hidupnya sebagai warga bangsa Indonesia terpenuhi. Dapat dikatakan, kesejahteraan yang dialami masyarakat adalah cerminan dari kesejahteraan dan kesuksesan penguasa dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan. Maka, mengikuti logika kekuasaan Han, perampasan hak dan seluruh kehendak *alter* (masyarakat) seperti dalam contoh kasus KKN sama sekali tidak baik untuk kelanggengan kekuasaan. Relasi kekuasaan antara pemerintah dan rakyat akan semakin harmonis, simetris, adil, makmur, dan stabil justru ketika hak dan kewajiban masing-masing subyek kekuasaan dijalankan dengan semestinya.

Pada titik inilah, apa yang disebut Han sebagai 'keadilan' dalam pembahasan mengenai etika kekuasaan itu perlu memanifestasikan diri. Keadilan meminta subyek yang berkuasa sebagai wakil seluruh rakyat yang menduduki pusat kekuasaan mengatasi kesejahteraan diri dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Junaidi, 2021). Biasanya, subyek yang adil tidak hanya bertindak secara proporsional (memberikan kepada seseorang apa yang pantas baginya) dalam menjalankan kekuasaan, tetapi selalu terbuka dan melampaui itu demi kepentingan banyak orang. Oleh karena itu, pemerintah sebagai subyek kekuasaan harus mampu menggunakan kekuasaan sebagaimana seharusnya, menjauhkan diri dari kecenderungan mengaktualisasikan diri sendiri atau kelompoknya, dan tidak menggunakan kekuasaan untuk tujuan-tujuan tertentu (Haliim, 2020). Atau, pemerintah tidak boleh menjadikan kekuasaan

sebagai alat untuk tujuan diri yang egoistis (Klein, 2008). Sehingga hanya dengan demikian kesejahteraan, kebahagiaan, kesetaraan, dan prinsip keadilan sebagai warga bangsa membumi di tanah air Indonesia.

3.3 Perlunya Mediasi Kekuasaan sebagai Upaya Memerangi Kekuasaan Otoriter

Kehendak bersama merupakan unsur esensial dari seluruh bangunan relasi antara *ego* dan *alter*. Perjumpaan antara *ego* dan *alter* dalam sebuah relasi kekuasaan tidak bisa tanpa melibatkan kehendak dan kepentingan bersama. Bagi Han, relasi kekuasaan dikatakan simetris apabila *ego* dan *alter* tidak mengutamakan kehendak pribadi atau kelompok tertentu dalam sebuah relasi kekuasaan, melainkan kehendak semua orang. Namun, dewasa ini deviasi relasi kekuasaan sering kali hadir dalam ruang publik. Subyek kekuasaan tampak bertindak lebih mengedepankan tujuan pribadi atau kelompok sendiri. Secara umum standar hidup akan lebih baik atau sejahtera ketika nilai-nilai demokrasi dapat di terapkan dengan baik (Zaini 2019). Hemat penulis, kenyataan seperti ini tidak jarang terjadi dalam relasi kekuasaan di Indonesia. Pemerintah sebagai penguasa negara kerap bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu dengan mengatasnamakan kehendak seluruh warga masyarakat.

Misalnya, pada 9 Juni 2008 pemerintah mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan eksistensi umat Ahmadiyah. Pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008 No KEP-033/A/JA/6/2008, NO 19 Tahun 2008 memberikan peringatan keras kepada umat Ahmadiyah agar membatasi kegiatan keagamaan demi kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bersama (Kaum Muslim) (Ummah, 2016). SKB tersebut menuai banyak kritik dari berbagai kalangan karena tidak mengakomodir kehendak dan kepentingan umat Ahmadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (terutama kehidupan beragama). Menurut institut SETARA, SKB itu mendiskreditkan kaum Ahmadiyah dan memberi celah bagi kelompok radikal untuk melegitimasi tindakannya yang tidak bermoral terhadap mereka (Wardah, 2012). Simak saja kasus Lombok, kasus Parung, kasus Manislor, kasus Diponegoro (Januari 2023), dan kasus lainnya oleh Jemaat Muslim terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Selain itu, tindakan kesewenangan pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan bisa juga kita lihat dalam kasus *Omnibus Law* yang hingga kini masih menyisakan perdebatan di sana-sini. Banyak pihak menilai *Omnibus Law* tidak mengakomodir aspirasi masyarakat dan memiliki peluang terjadinya tindakan korupsi akibat sentralisasi kekuasaan pada satu pihak, yakni presiden sebagai penguasa tertinggi suatu negara (Asmani, 2021). Hal yang sama juga terjadi dengan RUU *Omnibus* Kesehatan. Beberapa organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia memberikan reaksi penolakan terhadap kebijakan baru tersebut. Mereka mengklaim bahwa pembuatan RUU tidak melibatkan mereka sebagai representasi formal dari beberapa profesi kesehatan (Mochtar, 2022). Kasus lain juga, misalnya terjadi pada kebijakan sekolah jam lima pagi di NTT yang dikeluarkan oleh Gubernur Viktor Laiskodat. Kebijakan itu menuai banyak kritik dan dinilai tidak rasional (Evanalia, 2023).

Aneka contoh di atas menunjukkan subyek kekuasaan (pemerintah) tidak melibatkan kehendak semua orang dalam mengambil setiap kebijakan. Pemerintah yang berkuasa mengabaikan kehendak masyarakat tertentu demi kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu (Purnomo, 2007). Kesewenangan dalam membuat keputusan tidak dapat dipungkiri mencederai wajah etis kekuasaan dan menggiring masyarakat kepada sikap *distrust* bahkan kemarahan. Karena itu wajar saja jika aksi demo, mogok kerja, bentangan *poster* berupa kritikan, dan sebagainya misalnya dilakukan sebagai bentuk protes dari pihak yang dikuasa kepada yang berkuasa. Apalagi di era reformasi di mana kesederajatan, kesetaraan, dan keadilan sangat dijunjung tinggi. Subyek yang dikuasa dari sendirinya tidak mau hidup di bawah kekuasaan otoriter dan menjalankan kehidupan dalam kondisi tertekan.

Berangkat dari fenomena ini, relasi kekuasaan dalam negara demokrasi dengan demikian harus mengutamakan kehendak bersama. Subyek yang berkuasa tidak boleh menegasikan kehendak orang lain demi kehendak pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintah harus menjamin keadilan dan kesederajatan hidup setiap warga tanpa terkecuali (Sandel, 2009). Pemerintahan yang baik adalah penguasa yang tidak melembagakan kejahatan dan secara sistematis tidak meniadakan kelompok-kelompok tertentu demi kelompok lain atas tuduhan tidak sesuai dengan politik penguasa (Haryatmoko, 2015). Penulis meyakini bahwa relasi kekuasaan simetris akan terjadi justru ketika subyek kekuasaan (pemerintah) menjalankan roda kekuasaan secara tidak otoriter dan tidak memaksakan kehendak sendiri atau kelompok kepada orang lain (masyarakat).

Jika kita berkaca pada gagasan Han relasi asimetris antara pemerintah dan rakyat terjadi oleh karena pemerintah sebagai subyek yang berkuasa mengabsolutkan kebenaran kehendak (kebijakan) pribadi atau kelompok sendiri. Inilah yang disebut Han sebagai relasi kekuasaan tanpa mediasi. Subyek kekuasaan memaksakan kehendak berupa kebijakan-kebijakan tertentu agar dijalankan oleh masyarakat (Adorno 1950). Bagi penulis, minimnya mediasi kekuasaan dalam sebuah relasi kekuasaan membuat kehendak *alter* (masyarakat) tidak terakomodir dan berdampak pada kondisi represif. Masyarakat menerima kebijakan-kebijakan yang ada dan melaksanakannya secara terpaksa karena tidak melihat itu sebagai kehendaknya (Mahardika 2021). Atas dasar itu, pentingnya meningkatkan kapasitas mediasi dengan cara menerima kehendak yang lain bukan hanya kehendakku saja dalam sebuah relasi kekuasaan. Subyek kekuasaan membuka diri bagi orang lain dan membangun dialog yang melibatkan kehendak semua pihak demi terwujudnya kehendak bersama yang menyejahterakan semua. Bahkan dalam sebuah hubungan kekuasaan, koreksi dan kritikan mesti ada dan tidak boleh dianggap subversif. Penahanan dan persekusi massa yang melakukan demo, unjuk rasa, bentang *poster* berupa kritikan, dan lain-lain adalah salah satu contoh di mana kritikan dibungkam karena mengancam kelanggengan kekuasaan. Padahal koreksi dan kritikan itu penting sebagai bentuk pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan demi membangun kekuasaan yang lebih harmonis, simetris, dan mengabdikan masyarakat (Noviati, 2013).

Hemat penulis, salah satu aktualisasi nyata dari gagasan Han yang dilakukan penguasa selama ini ialah pemerintah mengundang mahasiswa atau pihak-pihak tertentu yang mewakili masyarakat untuk berdialog. Terkait masalah *Omnibus Law*, misalnya pemerintah melakukan dialog terbuka dengan beberapa perwakilan mahasiswa dan pihak terkait lainnya (Badai, 2020). Dengan adanya dialog terbuka, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya, baik berupa dukungan ataupun kritikan yang membangun demi terciptanya kehendak bersama dan lebih jauh lagi, yakni tercapainya *common good* (Riskiyono, 2015). Penulis meyakini dengan adanya dialog kehendak dan kepentingan antara subyek kekuasaan dan subyek yang dikuasa, sistem pemerintahan otoriter dapat diatasi dengan baik. Subyek kekuasaan dijauhkan dari tendensi dominasi kehendak pribadi atau tidak lebih berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu. Sehingga, masyarakat tidak tertekan oleh berbagai kehendak dan kebijakan penguasa, tetapi menerima keputusan itu secara sukarela sebagai kehendak dan keputusannya sendiri (Oktaviani & Pramadya, 2019). Jika hal ini terjadi, maka kekuasaan akan jauh lebih stabil dan menguat.

3.4 Pentingnya Independensi Diri untuk Mencegah Kepatuhan Buta terhadap Otoritas Kekuasaan

Manusia adalah makhluk independen. Sebagai makhluk yang independen, ia mampu berdiri sendiri dan bertindak atas kehendak diri (Kisner, 2011). Han menyebutnya subyektivitas atau independensi diri. Subyektivitas adalah daya atau kuasa yang memungkinkan manusia mampu membuat keputusan untuk menghendaki dan tidak menghendaki sesuatu. Namun, independensi diri tersebut acap kali tidak hadir dalam setiap keputusan praktis manusia. Dalam sebuah relasi kekuasaan, kuasa atas diri terkadang kabur dan tampak tidak berdaya (Setiawan, 2021). Manusia kerap tidak mampu masuk ke kedalaman diri dan bertindak secara benar

berdasarkan suara hati yang bergema dalam relung hatinya (Harjon, 2023a). Atau, subyek kekuasaan terkadang mengikuti begitu saja kehendak dari luar diri tanpa bisa membuat batas tegas yang kuat untuk mengatakan 'ya' dan 'tidak'.

Ketidakberdayaan manusia sebagai subyek yang otonom dapat kita simak dalam relasi kekuasaan antara Ferdi Sambo dan Richard Eliezer. Seperti yang kita ketahui bahwa Sambo adalah atasan dari Richard Eliezer. Sebagai subyek yang berkuasa, Sambo dari sendirinya mempunyai kekuasaan yang cukup besar atas bawahannya, Eliezer. Namun, terlepas dari besarnya kekuasaan Sambo atas Eliezer, tidak dapat dipungkiri bahwa Eliezer adalah seorang pribadi yang memiliki subyektivitas. Ia mempunyai kemampuan untuk mengatakan 'ya' dan 'tidak' atas kehendak penguasa. Menurut penulis, manusia sebagai subyek yang independen tidak pernah bersikap pasif saat berhadapan dengan sesuatu yang eksternal. Ketika berhadapan dengan kehendak dari luar, subyek kekuasaan selalu mampu kembali ke dalam diri dan memosisikan diri sebagai pribadi yang otonom.

Selain itu, dalam konteks yang lebih luas aneka persoalan serupa dapat ditemukan juga dalam komunitas atau kelompok seperti Shuni dan Syi'ah yang hingga kini belum menuai perdamaian. Pada Agustus 2012 lalu misalnya, terjadi penyerangan terhadap kelompok Syi'ah di Kecamatan Omben, Sampang ketika mereka merayakan lebaran. Peristiwa yang pernah terjadi pada Desember 2011 kini terulang kembali dan semakin menelan banyak korban; satu orang meninggal, beberapa orang lainnya mengalami kritis, dan banyak rumah rusak parah (terbakar) akibat penyerangan kelompok lain (Shuni) (Qodar, 2019). Berdasarkan data yang ada, penyerangan yang dilakukan massa Shuni terhadap kelompok Syi'ah tersebut dihasuti oleh pemimpin Shuni sendiri, kyai Rois (Mustolehudin, 2021). Bagi penulis, kejadian ini menunjukkan kehilangan interdependensi kelompok Shuni dalam menyikapi kekuatan otoritas. Mereka sebagai sebuah komunitas yang memiliki intersubyektivitas tidak mampu melakukan interiorisasi atas kehendak eksternal.

Pada prinsipnya, manusia sebagai pribadi yang otonom sejauh tidak terperangkap dalam sistem kerja mekanis dan menjadi jasad mati secara *natura* selalu memberikan reaksi tertentu terhadap kekuatan yang bertolak belakang dengan kehendaknya. Subyek kekuasaan tidak pernah bersikap pasif terhadap kekuatan yang bersifat memaksa. Kemampuan untuk bereaksi itu bukan karena ada stimulus dari luar, tetapi sungguh bersifat inheren sebagai ada independen. Karena itu, proses internalisasi kehendak eksternal ke dalam ruang batin adalah ciri dasar manusia sebagai makhluk hidup. Sebaliknya, manusia dikatakan jasad mati apabila mengikuti begitu saja kehendak asing dan bertindak atas kemauannya tanpa ada perlawanan.

Contoh kasus di atas membuka cakrawala berpikir kita bahwa manusia kadang kala mengalami kehilangan subyektivitas atau interdependensi dalam menyikapi kehendak eksternal. Patuh terhadap otoritas membuat tubuh seperti mesin. Seseorang atau sekelompok orang tidak mampu lagi melakukan interiorisasi atas kehendak eksternal, tetapi bersikap pasif. Selain itu, ketakutan akan kehilangan jabatan, merasa terancam akan perkembangan komunitas lain, dan hasrat yang besar akan uang menjadi alasan lain yang menyebabkan subyek kekuasaan gagal melakukan interiorisasi. Padahal tubuh bukan mesin dan tubuh tidak bekerja mengikuti sistem kerja mesin. Manusia sebagai pribadi yang otonom berbeda dengan sistem kerja mesin yang hanya bekerja secara mekanis. Ia mampu membuat keputusan dan penegasan terhadap perintah otoritas yang lebih tinggi. Bahkan dalam posisi dirantai (tidak berdaya) sebagaimana ditegaskan Han, misalnya subyek yang dikuasai masih memiliki daya untuk menyikapi kehendak penguasa. Sebab, penyebab eksternal tidak pernah mencapai efek tanpa ada keputusan dari dalam.

Senada dengan Han, penulis menegaskan bahwa subyek kekuasaan perlu menginteriorisasi kehendak eksternal saat berhadapan dengan otoritas yang lebih tinggi. Terutama, saat berada dalam situasi yang bersifat memaksa dan menuntut untuk taat secara buta, manusia mesti harus berani kembali ke dalam diri sendiri, ke dalam ruang batin, dan subyektivitasnya. Sehingga, seseorang tidak akan binasa oleh ketegangan negatif (paksaan) yang

disebabkan dari luar dirinya, melainkan mampu bertindak dengan baik dan benar berdasarkan keputusan yang jelas, bijaksana, dan otonom terhadap kehendak yang berkuasa.

4. Kesimpulan

Relasi kekuasaan simetris merupakan salah satu kerinduan terbesar dalam hidup manusia. Manusia menginginkan adanya kesetaraan, kesederajatan, kebebasan, dan kesejahteraan dalam relasi kekuasaan. Sebagai sesuatu yang dirindukan, semua orang tertatih-tatih mengejar dan memperjuangkan hal ini dalam mengada sehari-hari. Ia entah di posisi subyek maupun obyek, keberadaannya tidak mau bertentangan dengan eksistensi yang lain. Ia selalu mengharapkan keterlepasan dari rantai ketimpangan dan alienasi akibat relasi asimetris. Bagi Han, inilah yang disebut relasi ketergantungan timbal balik antara *ego* dan *alter*. Jika *ego* membutuhkan kerja sama dari *alter*, maka ketergantungan *ego* pada *alter* adalah hasilnya. *Ego* tidak bisa memaksakan kehendaknya pada *alter* pun sebaliknya *alter* tidak bisa bertindak semena-mena di luar tuntutan melaksanakan kehendak *ego* yang adalah kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, ketergantungan timbal balik memungkinkan *ego* dan *alter* saling mengutamakan kehendak bersama dan menegasikan kehendak pribadi dalam relasi kekuasaan.

Gagasan kekuasaan Han memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang dibangun atas dasar kehendak baik semua warga sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila. Mewujudnya nilai kesetaraan, kesederajatan, kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dalam sebuah relasi kekuasaan adalah nilai dasar yang mesti dihidupi. Pertanyaan yang dapat diajukan terkait hal ini ialah sudahkah negara Indonesia mengejawantahkan nilai-nilai tersebut? Jika kita kembali berkaca pada uraian sebelumnya, maka harus diakui bahwa negara Indonesia masih terjebak dalam rantai ketimpangan. Relasi kekuasaan kerap diwarnai oleh tindakan represif, dominatif, otoriter, intimidatif, ketidakbebasan, ketidakadilan, dan KKN. Kasus persekusi mayoritas atas minoritas (antara Dayak dan Madura, Sambas, Ambon, Poso, dan lain-lain), konflik antara pemerintah dengan masyarakat, atasan dan bawahan dalam instansi pemerintah (kasus Sambo) atau dalam kelompok dan komunitas tertentu (seperti Shuni vs Syi'ah), dan KKN sangat kuat mengindikasikan maraknya relasi kekuasaan asimetris di Indonesia. Atas dasar itu, ide Han tentang kekuasaan harus diaktualisasikan agar beragama anomali kekuasaan yang ada segera diminimalisir.

Daftar Pustaka

- Alpin, C. and F. D. (2021). Biopolitics in the 'Psychic Realm': Han, Foucault and Neoliberal Psycopolitics. *SAGE Journals: Philosophy and Social Criticism*, XX(X), 1–15.
- Ashcroft, C. (2021). *Violence and Power in the Thought of Hannah Arendt*. University of Pennsylvania Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv18dvv7g>
- Asmani, N. I. dan A. M. F. (2021). Penolakan Omnibus Law menurut paradigm Sosiologi Hukum dan Teori Konflik. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 106.
- Atthahara, H. (2020). Perspektif Ideologi Dan Kekuasaan Dalam PemikiranMachiavelli: Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden2019. *Jurnal JISIPOL*, 4(1), 85–100. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/download/261/231/891>
- Badai, T. (2020). *Dialog UU Cipta Kerja terus Berlanjut*. Republika.
- Bagus Riadi. (2020). Menggugat Hegemoni Demokrasi: Disciplinary Power Demokrasi di Negara Dunia Ketiga. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 80–96. <https://doi.org/10.32734/politeia.v12i2.3695>
- Beauchamp, S. T. (2022). *German-Korean Philosopher Byung-Chul Han Offers Surprising Insights Into Our Contemporary Condition*. The Gadfly: City Journal. <https://www.city-journal.org/german-korean-philosopher-byung-chul-han-offers-surprising-insights>

- Dister, N. S. (1991). *Filsafat Kebebasan*. Kanisius.
- Evanalia, S. (2023). PGRI: Kebijakan Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di Kupang NTT Tak Rasional. *Kompas*. <https://www.kompas.tv/article/384105/pgri-kebijakan-masuk-sekolah-jam-5-pagi-di-kupang-ntt-tak-rasional>
- Goltz, S. M. (2020). On Power and Freedom: Extending the Definition of Coercion. *Perspectives on Behavior Science*, 43(1), 137–156. <https://doi.org/10.1007/s40614-019-00240-z>
- Gule, Y. (2021). Studi Teologi-Etis Hubungan Perilaku Korupsi sebagai Dampak Sikap Hidup Hedonis. *Kontekstualita*, 36(01), 69–88.
- Haliim, W. (2020). Problematika kebijakan dana hibah dan bantuan sosial sumber APBD: Relasi korupsi terhadap kekuasaan kepemimpinan, dan perilaku elit. *Inovasi*, 17(1), 39–53.
- Hamudy, N. A. (2022). Membaca Saman dalam Bingkai Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas. *Dekonstruksi*, 6(01), 113–127.
- Han, B.-C. (2005). *Was ist Macht?* Reclam Philipp.
- Han, B.-C. (2015). *The Transparency Society* (Erik Butler (trans.)). Stanford University Press.
- Han, B.-C. (2017a). *In the Swarm Digital Prospects* (E. Butler (trans.)). The MIT Press.
- Han, B.-C. (2017b). *The Agony of Eros* (Erick Butler (trans.)). The MIT Press.
- Han, B.-C. (2019). *What is Power* (Daniel Steuer (trans.)). Polity Press.
- Harari, Y. N. (2015). *Sapiens: A Brief History of Humankind*. HarperCollins.
- Harjon, Y. (2023a). KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN KESESATAN HATI NURANI. *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 4(1), 25–42.
- Harjon, Y. (2023b). Sumbangan Konsep Fusi Horizon dalam Hermeneutika Gadamer bagi Proses Perumusan Sila Pertama Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 179–190. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.169>
- Haryatmoko. (2015). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Kompas.
- Henry-Priyono, B. (2021). *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuatan: Filsafat Politik and What is All About*. Penerbit Buku Kompas.
- Heyes, C.J. (2010). *Subjektivitas and Power dalam Michel Foucault: Key Concepts* (Diana Taylor (ed.)). Acuman Publisng.
- Izziyana, W. V. (2019). Korupsi Dalam Dimensi Kekuasaan. *Law Pro Justitia*, 1(2).
- Jauhari, A. (2016). Konsep Metafisika Emmanuel Levinas. *Yaqzhan*, 2(1), 15–25. <http://dx.doi.org/10.24235/jy.v2i1.910>
- Junaidi, J. (2021). Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17–27.
- Kaelan, H. (2018). *Etika Kehidupan Berbangsa: Prinsip-Prinsip dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*. Paradigma.
- Kamahi, U. (2017). *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik*.
- Kardiat, Y. (2022). Organisasi sebagai Arena Kekuasaan Politik. *Palangga Praja*, 4(1), 45–50. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/2639/1270>
- Kisner, M. J. (2011). *Spinoza on Human Freedom*. Cambridge University Perss.
- Klein, P. (2008). *Kebebasan Kreatif menurut Nikolay Berdiayev: Terang Pengharapan dalam Dunia yang Gelap* (Paul Sabon Nama (trans.)). Ledalero.
- Klitgaard, R. (1998). *Membasmi Korupsi*. Obor.
- Koten, Y. K. (2010). *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*. Ledalero.
- MAHARDIKA, H. I. (2021). *Representasi Kekuasaan dan Perlawanan dalam Film 1984 (Analisis Wacana Film "1984" karya George Orwell)*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Miller, S. (2016). *Corruption and Anti-Corruption in Poling-Philosophical and Ethical Issues*. Springer Nature.
- Mochtar, I. (2022). *Kontraversi RUU Kesehatan*. Kompas.
- Mubarak, H. dan I. D. K. (2020). Diskriminasi terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus di Banda Aceh. *Seurune Jurnal Psikologi Unsyiah*, 3(2), 57.

- Mustolehudin. (2021). Mengenal Ajaran Gerakan Syi'ah. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 11(4), 172.
- Newman, S. (2022). Power, Freedom and Obedience in Foucault and La Boétie: Voluntary Servitude as the Problem of Government. *Theory, Culture and Society*, 39(1), 123-141. <https://doi.org/10.1177/02632764211024333>
- Ngatun & Adry Yanto Saputra. (2020). Implementasi Pemikiran Emmanuel Levinas Dalam Teori Tanggung Jawab terhadap Orang Lain dan Relevansinya bagi Relasi antar Manusia Pasca Covid-19. *Jurnal Filsafat Teologi Kontekstual*, 1(1), 30-37.
- Nietzsche, F. (1968). *The Will to Power* (W. K. and R. J. Hollingdale (trans.)). Vintage Books.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 353.
- Nugraheni, A. (2022). Rakyat Merindukan Wakil Rakyat yang Merakyat. *Kompas*, 3.
- Oktaviani, J., & Pramadya, T. P. (2019). Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli. *Indonesian Perspective*, 4(2), 175-190. <https://doi.org/10.14710/ip.v4i2.26701>
- Pandor, P. (2020). Menyoal Persahabatan Sebagai Problem Relasionalitas: Sebuah Kontruksi Atas Konsep Alteritas Emanuel Levinas Dan Pluralitas Hannah Arendt. *Seri Filsafat Teologi*, 30(29), 66-94.
- Purnomo, A. B. (2007). *Rakyat (Bukan) Tumbal (Kekuasaan & Kekerasan)*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Qodar, N. (2019). *26 Agustus 2012: Lebaran Berdarah Warga Syi'ah di Sampang Madura*. Liputan6.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Aspirasi*, 6(2), 162-163.
- Rizal, D. dan A. Z. (2019). Hubungan Etika Politik Dan Kekuasaan. *Jurnal JISIP-UNJA*, 3(1), 17-18.
- Salsabilah, W., & Yunike Putri, R. (n.d.). KEKUASAAN DALAM RANAH KAJIAN POLITIK DAN ORGANISASI. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)* (Vol. 2, Issue 1).
- Sandel, M. J. (2009). *Justice: What's the Right Thing to Do?* Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Setiawan, R. (2021). *Subjektivitas dalam Filsafat Politik Alain Badiou dan Slavoj Žižek*. IRCISOD.
- Soebagiyo, E. (2020). Humanisme Bagi Sesama - Menyingkap Akar Kekerasan Dalam Relasi Antarmanusia Dan Etika Tanggung Jawab Menurut Emmanuel Levinas. *Seri Filsafat Teologi*, 30(29), 137-157. <https://doi.org/10.35312/serifilsafat.v30i29.18>
- Soewandi, A. T., & Wijanarko, R. (2021). Personal Branding dan Diri Otentik Menurut Sartre. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 179-185.
- Spinoza, B. (2002). *Ethics* (Michael L. Morgan (trans.)). Hackett Publishing Company.
- Suci Ramadhani, P., Fitri Yani, D., & Masliani Lubis, D. (2023). *Kekuasaan Dan Politik Dalam Perilaku Organisasi* (Vol. 1, Issue 1). <https://edujavare.com/index.php/jrrWebsite:https://edujavare.com/>
- Sunardi, S. (1996). *Nietzsche*. PT LKIS Printing Cemerlang.
- Suseno, F. M. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Cetakan Ke-8 Edisi Revisi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sutrisno, M. (2004). *Ide-Ide Pencerahan*. Obor.
- Theodor Adorno, dkk. (1950). *The Authoritarian Personality*. Harper & Brothers.
- Triantini, Z. E. (2019). *Meta Konsep Kekuasaan Dan Demokrasi Dalam Kajian Teori Politik*. 2(2), 2019.
- Truman, N. E. (1904). *Maine de Biran's Philosophy of Will*. The Macmillan Company.
- Ummah, A. (2016). Ahmadiyah Dan Hak Atas Kebebasan Beragama. *Jurnal Keamanan*

- Nasional*, 2(1), 68-70.
- Valerian, H. F. (2021). Perjumpaan dengan Yang Lain: Refleksi Filosofis terhadap Film “Hotel Rwanda” dari perspektif Etika menurut Emmanuel Levinas. *Jurnal Ledalero*, 20(1), 143-159.
- Wangga, M. S. E., Kardono, R. B. A., & Wirawan, A. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 39-60.
- Wardah, F. (2012). *Setara Institute: Cabut SKB 3 Menteri Tentang Ahmadiyah*. Voaindonesia.
- Wijanarko, R. (2021). Religious Populism and Public Sphere in Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 1-9.
- Wijanarko, R., & Saeng, V. (2022). Human Beings and Social Structure in Frantz Fanon’s Philosophical Thought. *Jurnal Filsafat*, 32(1), 87-107.
- Zaaiman, J. (2020). Power and influence: Assessing the conceptual relationship. *Koers*, 85(1), 1-14. <https://doi.org/10.19108/KOERS.85.1.2466>
- Zamzuri, A. (2018). Kekuasaan Mata dan Pemosisian Subjek dalam Puisi karya Joko Pinurbo. *Gramatika: Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan*, 6(2), 169-179.